

**HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN PIMPINAN (KEPALA UPTD
TERMINAL ANGKUTAN) DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
KERJA PEGAWAI UPTD TERMINAL ANGKUTAN DI TERMINAL
TAMANAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



Uptd:	...	Klass
Terima:	...	608. 3
No. Induk	20 FEB 2002	SUD
KLASIR / PENYAL	0207	h

Oleh :

J Gede Agus Sudarto

NIM : EIC195177

Pembimbing I

Drs. H. Hendro Muljono

Pembimbing II

Drs. Soetomo, Msi

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

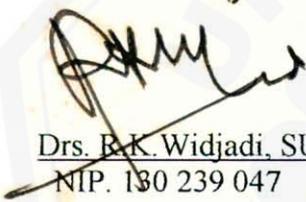
Pada

Hari/tgl : Selasa, 29 Januari 2002

Jam : 10.00 WIB – selesai

Tim Penguji

Ketua

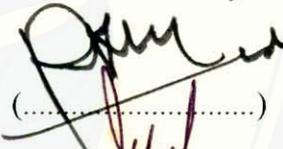

Drs. R.K. Widjadi, SU
NIP. 130 239 047

Sekretaris


Drs. Soetomo, Msi
NIP. 131 965 845

Anggota:

1. Drs. R.K. Widjadi, SU
2. Drs. Soetomo, Msi
3. Drs. S. Soerantomo


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

MOTTO

“ Janganlah membuang waktu dengan menyesali nasibmu, orang muda sibuklah, kerjakanlah segalanya yang untuk melakukannya kau tidak pernah punya waktu”. (Agatha Christie).



PERSEMBAHAN

1. Bapak (Alm) dan Ibu atas segala pengorbanannya dan kasih sayangnya yang tulus kepada ananda.
2. Kakak-kakakku, adik-adikku terima kasih atas dukungannya selama ini.
3. Sweet Person, YASTI Terima kasih atas pengorbanan dan aliran perhatian yang masih kau torehkan.
4. Almamaterku.



KATA PENGANTAR

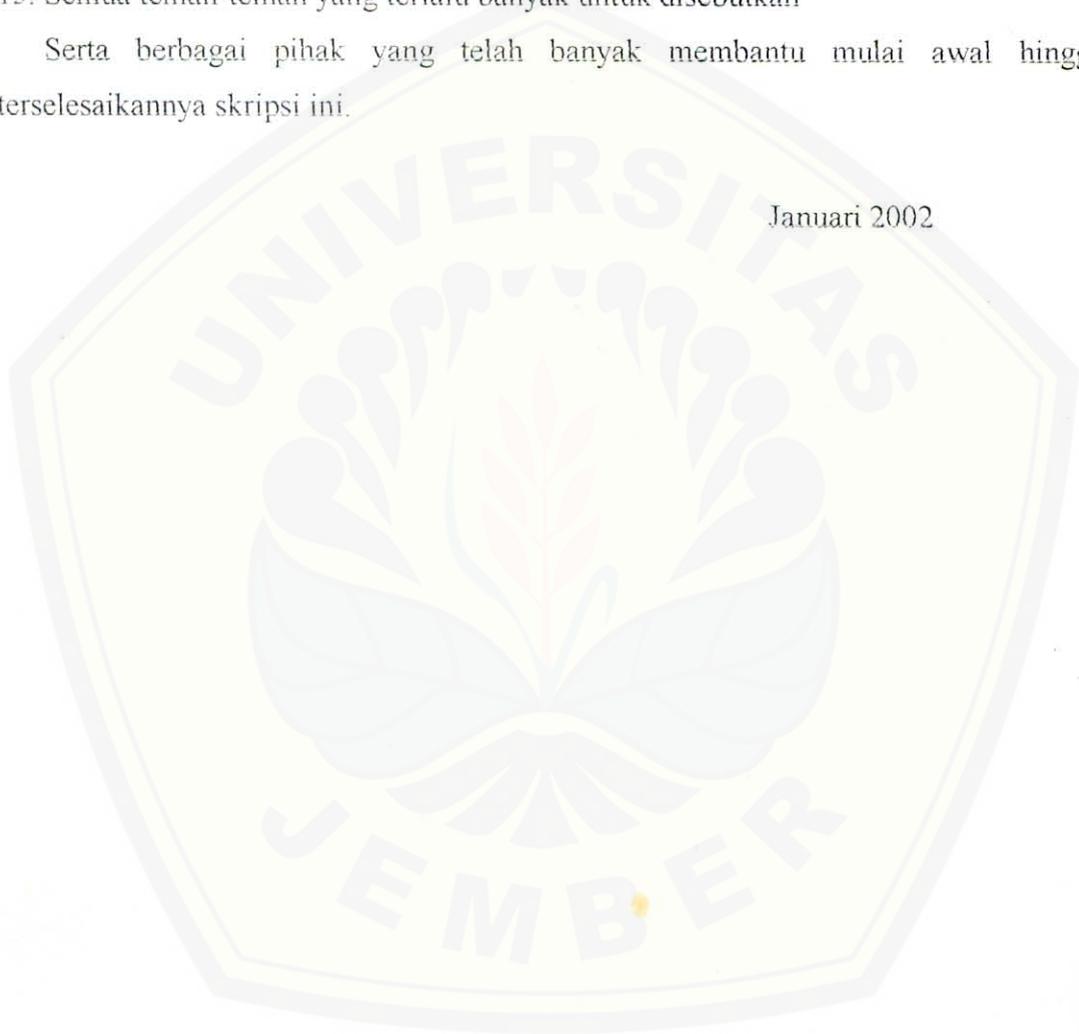
Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan YME, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN PIMPINAN (KEPALA UPTD TERMINAL ANGKUTAN) DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA PEGAWAI UPTD TERMINAL ANGKUTAN DI TERMINAL TAMANAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak (Alm) dan Ibu yang telah mendidik, membimbing dan mengasuhku serta terus mengalirkan kasih sayangnya saat suka maupun duka dengan tulus ikhlas.
2. Drs. H. M Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Mud'har Syarifudin selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi.
4. Drs. Boediono, Msi selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Drs. H. Hendro Muljono selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Drs. Sutomo, Msi selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Drs. H. Soenarjo DW selaku Dosen Wali.
8. Segenap Civitas Akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
9. Bapak Ir. Bambang Basuki Hanugrah, MM selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri.

10. Bapak Asnapi selaku Kepala UPTD Terminal Angkutan Tamanan Pemerintah Kota Kediri.
11. Seluruh pegawai kantor UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.
12. Keluarga Besar Halmahera II / 17 atas kebersamaannya selama ini.
13. Semua teman-teman yang terlalu banyak untuk disebutkan
Serta berbagai pihak yang telah banyak membantu mulai awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Januari 2002



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Lampiran	viii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
1.4 Kerangka Teori	25
1.5 Hipotesis	37
1.6 Definisi Operasional	38
1.7 Metode Penelitian	42
1.7.1 Penentuan Populasi	43
1.7.2 Metode Penentuan Sampel	44
1.7.3 Metode Pengumpulan Data	46
1.7.4 Metode Analisa Data	47
II. Deskripsi Daerah Penelitian	51
2.1 Pengantar	51
2.2 Gambaran Singkat UPTD Terminal Angkutan	51
2.3 Kondisi UPTD Terminal Angkutan	52
2.4 Susunan Organisasi UPTD Terminal Angkutan	55
2.5 Uraian Tugas	56
2.6 Keadaan Pegawai	60

III. Penyajian Data Variabel Penelitian	62
3.1 Pengantar	62
3.2 Penyajian Data Variabel Pengaruh (X)	62
3.2.1 Pengawasan Langsung (X1)	63
3.2.2 Pengawasan Tidak Langsung (X2)	65
3.3 Penyajian Data Variabel Terpengaruh (Y)	68
3.3.1 Kuantitas Kerja (Y1)	68
3.3.2 Kualitas Kerja (Y2)	70
3.3.3 Efektivitas Waktu (Y3)	72
IV. Analisa dan Interpretasi Data	75
4.1 Pengantar	75
4.2 Penentuan Nilai Rank	75
4.2.1 Variabel Pengawasan	75
4.2.2 Variabel Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai	77
4.3 Perhitungan Korelasi	78
4.4 Analisa dan Interpretasi Data Tentang Pengawasan Pimpinan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai	83
V. Penutup	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	88

DAFTAR TABEL

- Tabel I Program kerja UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2000
- Tabel II Realisasi kegiatan pada kantor UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2000
- Tabel III Target dan Realisasi Retribusi Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2000
- Tabel IV Kegiatan Pengawasan Kepala UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2000
- Tabel V Jenis Kendaraan Angkutan Orang dan Barang Di Wilayah Kota Kediri Tahun 2000
- Tabel VI Trayek Angkutan Kota Wilayah Kota Kediri Tahun 2000
- Tabel VII Jumlah Pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel VIII Jumlah Pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Berdasarkan Golongan dan Pangkat
- Table IX Jumlah Pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Berdasarkan Bagian Pekerjaan
- Tabel X Data Skor Jawaban Responden Tentang Pengawasan Langsung (X1)
- Tabel XI Data Skor Jawaban Responden Tentang Pengawasan Tidak Langsung (X2)
- Tabel XII Data Skor Jawaban Responden Tentang Pengawasan Pimpinan
- Tabel XIII Data Skor Jawaban Responden Tentang Kuantitas Kerja (Y1)
- Tabel XIV Data Skor Jawaban Responden Tentang Kualitas Kerja (Y2)
- Tabel XV Data Skor Jawaban Responden Tentang Efektivitas Waktu (Y3)
- Tabel XVI Data Skor Jawaban Responden Tentang Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai
- Tabel XVII Penentuan Nilai Rank Terhadap Variabel Pengaruh (X)

Tabel XVIII Penentuan Nilai Rank Terhadap Variabel Terpengaruh (Y)

Tabel XIX Tabel Kerja Untuk Mencari Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Tabel XX Prosentase Jawaban Dari Variabel Pengawasan Pimpinan

Tabel XXI Prosentase Jawaban Dari Variabel Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai

Tabel XXII Analisa Data Variabel X dan Y



LAMPIRAN

- Lampiran I Program Kerja UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2000
- Lampiran II Struktur Organisasi UPTD Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri
- Lampiran III Tabel Harga-Harga Kritis rs Koefisien Korelasi Rank Spearman
- Lampiran IV Tabel Nilai-Nilai
- Lampiran V Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian Dari Lemlit Universitas Jember
- Lampiran VI Surat Keterangan Melakukan Survei Dari Kantor Kesbank Dan Limmas Pemerintah Kota Kediri
- Lampiran VII Surat Keterangan Survai Dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Kediri

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan sebuah negara, dimana pembangunan berperan penting untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, begitu pula dengan bangsa Indonesia. Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses yang terjadi secara terus-menerus yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh manusia untuk mengangkat kehidupannya dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang dianggap lebih baik dalam rangka pembinaan bangsa. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (1985:9) bahwa, "Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa."

Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga menuntut partisipasi dari seluruh rakyat untuk bersama-sama dalam mencapai suatu perubahan dan keadaan yang lebih baik. Tjokrowinoto (1987:1) mengemukakan bahwa, "pembangunan adalah proses berencana dari situasi nasional ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi, dengan kata lain pembangunan mencakup proses perbaikan."

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia disebut dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan pembangunan nasional tersebut terkatub dalam GBHN (1999), yaitu :

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk

mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Tujuan negara sebagaimana yang dicita-citakan akan terlaksana jika ada partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkannya. Pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Hal ini karena terlalu luas dan kompleksnya urusan yang harus ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Implikasinya adalah menyerahkan sebagian urusan pusat kepada daerah yang salah satunya dengan menerapkan sistem desentralisasi yang telah melahirkan otonomi daerah. Adapun pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 yaitu, "otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dengan otonomi berarti memberi keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan serta perluasan peran serta masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan.

Pemerintah Daerah Kota Kediri adalah salah satu dari pemerintah daerah yang merupakan perwujudan dari terbentuknya daerah yang berotonomi. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dibutuhkan sumber daya yang memadai. Mengingat tidak semua sumber dapat diberikan kepada daerah, maka daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah menurut pasal 79 Undang-Undang No 22 Tahun 1999 adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah ;
2. Hasil Retribusi Daerah,

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Pinjaman Daerah ; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah belum terjadi secara optimal. Sedangkan untuk menjamin kelancaran proses pembangunan di daerahnya, pemerintah daerah sangat membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Karena itu tanpa adanya dukungan dana yang memadai , maka penyelenggaraan segala tugas dan kewenangan daerah dalam melaksanakan proses pembangunan tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Daerah Kota Kediri sebagian dari pendapatan asli daerahnya berasal dari hasil penarikan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh dinas-dinas sebagai unsur pelaksana daerah. Dinas-dinas tersebut antara lain: Dinas Informasi, Komunikasi dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pasar, Dinas Pendapatan dan Dinas Pertanian. Salah satu dari dinas-dinas tersebut yaitu Dinas Perhubungan, yang mana dalam Dinas Perhubungan tersebut terdapat berbagai jenis penarikan retribusi, salah satunya yaitu retribusi terminal angkutan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal, dibawah penanganan, pengelolaan dan pengawasan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Angkutan. Retribusi terminal angkutan ini juga memberikan andil bagi pertambahan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri, sehingga diperlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih optimal.

Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Kediri merupakan dinas daerah yang pembentukan susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No 11 Tahun 2000 tentang struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana daerah. Serta Keputusan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2001 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan.

Sejalan dengan kebijaksanaan program pembangunan daerah secara garis besar, tugas, fungsi dan peranan dinas perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai Dinas Teknis

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan daerah dan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Propinsi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka dinas perhubungan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan pembinaan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan daerah sesuai kebijaksanaan Gubernur.
- Melaksanakan pembinaan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan daerah sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh menteri perhubungan.
- Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh walikota.

Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan lancar maka dinas perhubungan mempunyai peranan memadukan kegiatan operasional dilapangan dengan dinas atau instansi terkait untuk kelancaran dan keberhasilan penataan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Sebagai Dinas Penghasil

Mempunyai tugas, fungsi dan peranan dalam menggali, merumuskan dan merencanakan sumber-sumber pendapatan asli daerah sekaligus memungut dan menghimpun retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

UPTD Terminal Angkutan disamping bertugas memungut retribusi, juga merupakan publik service akibat adanya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Publik Service). Sebagai publik service (pelayanan masyarakat) UPTD Terminal Angkutan dituntut untuk memberikan hasil timbal balik kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik dan berkualitas dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga masyarakat pemakai jasa tidak keberatan untuk membayar retribusi karena sesuai dan seimbang dengan pelayanan yang diterima. Oleh sebab itu program kerja UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri adalah program kerja yang mendukung pelaksanaan tugas UPTD Terminal Angkutan sebagai dinas penghasil dan publik service seperti yang tercermin dalam lampiran 1 tabel 1.

Dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Kota Kediri terdapat juga kerjasama dalam melakukan aktifitas-aktifitas organisasi yang didasarkan pada kejelasan tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing anggota guna tercapainya tujuan organisasi.

Sondang P. Siagian (1983:116) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut :

Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terlihat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa suatu organisasi tidak terlepas dari kedudukan, peranan dan tugas-tugas pimpinan dan bawahan. Keduanya dipandang sebagai sumber daya utama bagi organisasi yang akan melaksanakan tugas, program kerja dan penggunaan alat-alat atau sarana prasarana yang dimiliki oleh organisasi demi tercapainya tujuan.

Dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat penting. Kepemimpinan disini tidak secara

perorangan saja melainkan juga bisa secara kelompok. Dalam kepemimpinan terdapat fungsi, pengikut dan situasi yang merupakan satu kesatuan, sedangkan fungsi dari kepemimpinan itu sendiri adalah bertanggung jawab untuk mengatasi hambatan yang akan menghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi, sebagaimana pendapat dari Sondang P. Siagian :

“Sukses tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung kepada kemampuan seorang pimpinan untuk menggerakkan sumber-sumber dan alat-alat sehingga penggunaannya berjalan secara efisien dan efektif (1986:7)”

Jadi pimpinanlah yang bertanggung jawab atas seluruh aktifitas dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif, karena sebagai pimpinan ia mempunyai tugas memimpin, menggerakkan dan mengawasi bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Sehubungan dengan pencapaian tujuan secara efektif menurut Emerson (dalam Handayani, 1986:16) mengemukakan pendapatnya yaitu, “Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh besar terhadap yang dikehendaki.”

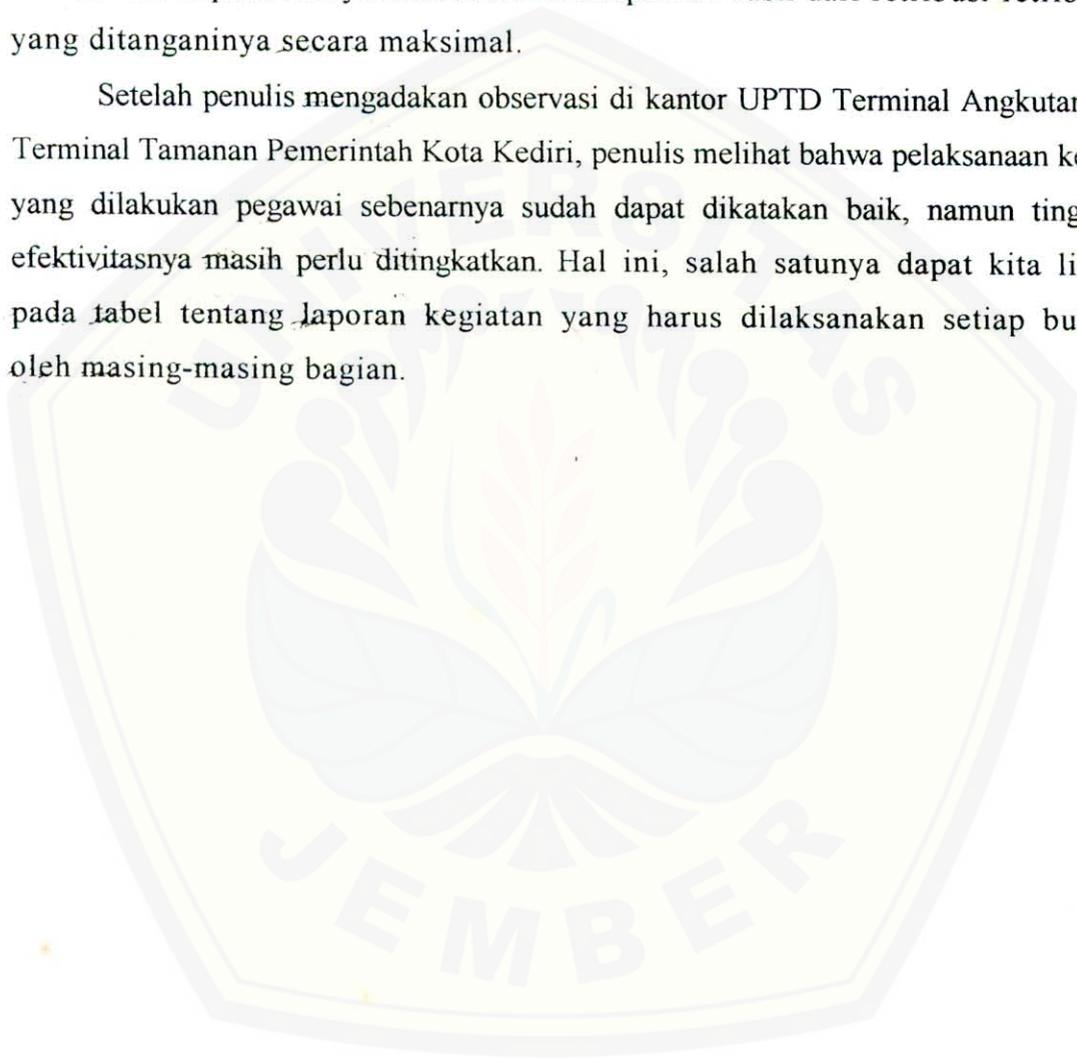
Sedangkan tentang efektifitas pelaksanaan pekerjaan dikemukakan oleh Westra (1987:81) berikut ini.

Efektifitas pelaksanaan pekerjaan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang pegawai, karyawan yang dapat menimbulkan suatu akibat terwujudnya tujuan sesuai dengan ketentuan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pegawai dalam melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan rencana dan memberikan akibat seperti yang telah ditetapkan organisasi.

Begitu juga efektivitas pelaksanaan kerja pegawai dilingkungan kantor UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri, dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan kerja pegawai sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi, dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat serta mendapatkan hasil dari retribusi-retribusi yang ditanganinya secara maksimal.

Setelah penulis mengadakan observasi di kantor UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri, penulis melihat bahwa pelaksanaan kerja yang dilakukan pegawai sebenarnya sudah dapat dikatakan baik, namun tingkat efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini, salah satunya dapat kita lihat pada tabel tentang laporan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing bagian.



Tabel 2. Realisasi Kegiatan Pada Kantor UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2000

Bagian	Laporan Kegiatan	Batas Tanggal/ Bulan	Penyerahan dalam 1 tahun		Prosentasi realisasi (%)	Rata-rata (%)
			Target	Realisasi		
Pos Siaran	Laporan pelaksanaan kegiatan dalam mengawasi sirkulasi arus kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum; mengatur keberangkatan setiap kendaraan umum sesuai jadwal masing-masing trayek dan memantau tarif angkutan	3	48	36	75	80
Retribusi bedak	Laporan pelaksanaan kegiatan dalam menarik atau memungut retribusi bedak dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam menarik dan memungut retribusi bedak serta penyectorannya.	3	48	40	83	
Keamanan	Laporan pelaksanaan kegiatan dalam menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban	3	48	36	75	
Retribusi peron	Laporan pelaksanaan kegiatan dalam menarik atau memungut retribusi peron dan hasil pelaksanaan dalam menarik atau memungut retribusi peron serta penyectorannya.	3	48	40	83	
Tata Usaha	Laporan pelaksanaan kegiatan dalam mengelola administrasi kepegawaian; mengelola administrasi keuangan; mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; mengelola peralatan dan perbekalan.	3	48	40	83	
Retribusi kendaraan	Laporan pelaksanaan kegiatan dalam menarik atau menungut retribusi kendaraan yang terdiri dari retribusi bus, mpu, parkir terminal, dan angkot serta hasil pelaksanaan kegiatan dalam memungut retribusi tersebut dan penyectorannya.	3	48	40	83	

Sumber data : UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

Tabel 2. di atas menunjukkan pelaksanaan kegiatan kerja pegawai yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Pos Siaran

Pada bagian pos siaran dalam membuat laporan dibatasi penyerahannya sampai tanggal 3 setiap bulannya, yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dalam mengawasi sirkulasi arus kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, mengatur keberangkatan setiap kendaraan umum sesuai jadwal masing-masing trayek dan memantau tarif angkutan. Selama periode tahun 2000 ditargetkan 48 laporan, terealisasi sebanyak 36 laporan (75%) saja yang sesuai dengan target. Artinya terdapat 36 laporan (75%) yang dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan terdapat 12 laporan (25%) yang masih belum sesuai dengan ketentuan awal atau target.

2. Bagian Retribusi Bedak

Pada bagian retribusi bedak dalam membuat laporan dibatasi penyerahannya sampai tanggal 3 setiap bulannya, yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dalam menarik atau memungut retribusi bedak dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam menarik dan memungut retribusi bedak serta penyetorannya. Selama periode tahun 2000 ditargetkan 48 laporan, terealisasi sebanyak 40 laporan (83%) saja yang sesuai dengan target. Artinya terdapat 40 laporan (83%) yang dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan terdapat 8 laporan (17%) yang masih belum sesuai dengan ketentuan awal atau target.

3. Bagian Keamanan

Pada bagian keamanan dalam membuat laporan dibatasi penyerahannya sampai tanggal 3 setiap bulannya, yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dalam menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban serta hasil pelaksanaan kegiatan tersebut. Selama periode tahun 2000 ditargetkan 48 laporan, terealisasi sebanyak 36 laporan (75%) saja yang sesuai dengan target. Artinya terdapat 36 laporan (75%)

yang dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan terdapat 12 laporan (25%) yang masih belum sesuai dengan ketentuan awal atau target.

4. Bagian Retribusi Peron

Pada bagian retribusi peron dalam membuat laporan dibatasi penyerahannya sampai tanggal 3 setiap bulannya, yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dalam menarik atau memungut retribusi peron dan hasil pelaksanaan kegiatan penarikan atau pemungutan retribusi tersebut serta penyeterannya. Selama periode tahun 2000 ditargetkan 48 laporan, terealisasi sebanyak 40 laporan (83%) saja yang sesuai dengan target. Artinya terdapat 40 laporan (83%) yang dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan terdapat 8 laporan (17%) yang masih belum sesuai dengan ketentuan awal atau target.

5. Bagian Tata Usaha

Pada bagian tata usaha dalam membuat laporan dibatasi penyerahannya sampai tanggal 3 setiap bulannya, yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dalam mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan, mengelola urusan rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan serta mengelola peralatan dan perbekalan. Selama periode tahun 2000 ditargetkan 48 laporan, terealisasi sebanyak 40 laporan (83%) saja yang sesuai dengan target. Artinya terdapat 40 laporan (83%) yang dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan terdapat 8 laporan (17%) yang masih belum sesuai dengan ketentuan awal atau target.

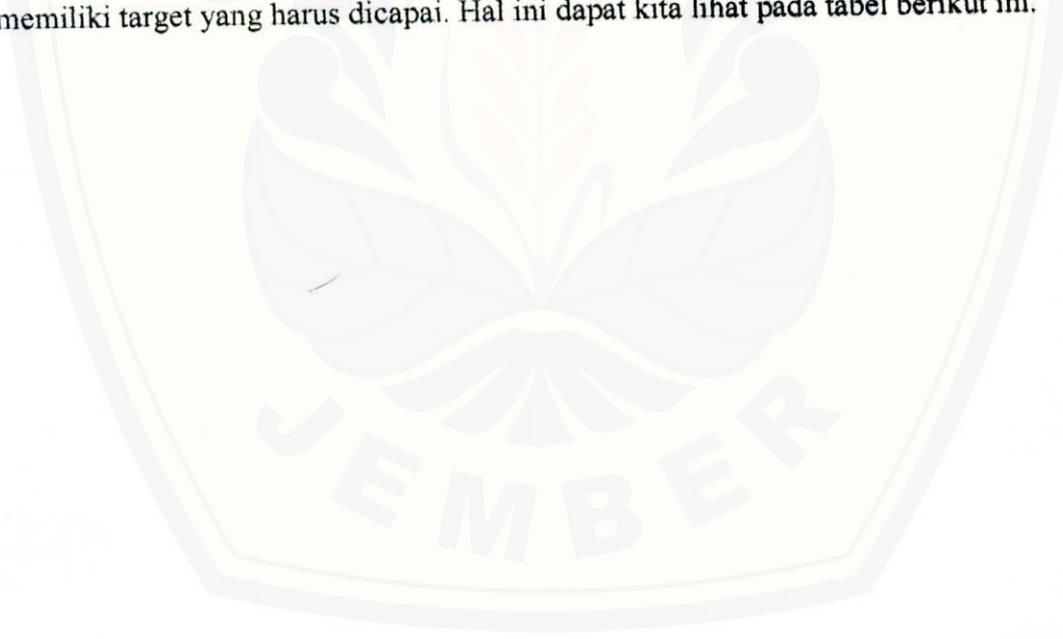
6. Bagian Retribusi Kendaraan

Pada bagian retribusi kendaraan dalam membuat laporan dibatasi penyerahannya sampai tanggal 3 setiap bulannya, yang meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dalam menarik atau memungut retribusi kendaraan yang terdiri dari retribusi bus, MPU, parkir terminal dan angkot serta hasil pelaksanaan kegiatan penarikan atau pemungutan retribusi tersebut dan penyeterannya. Selama periode tahun 2000 ditargetkan 48 laporan, terealisasi sebanyak 40 laporan (83%) saja yang sesuai dengan target. Artinya terdapat 40 laporan (83%) yang dapat diselesaikan sesuai

dengan ketentuan dan terdapat 8 laporan (17%) yang masih belum sesuai dengan ketentuan awal atau target.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan yang harus dikerjakan oleh masing-masing bagian dengan batas waktu yang telah ditentukan, secara keseluruhan sudah dapat dikategorikan baik, yaitu rata-rata 80 %. Akan tetapi hal ini perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Selanjutnya seperti yang telah penulis kemukakan bahwa selain sebagai organisasi publik, UPTD Terminal Angkutan juga sebagai organisasi penghasil. Sebagai organisasi publik, UPTD Terminal Angkutan berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, dari pelayanan inilah maka UPTD Terminal Angkutan akan memperoleh hasil dari pemungutan retribusi-retribusi yang ditanganinya. Oleh karena itulah maka UPTD Terminal Angkutan berfungsi juga sebagai organisasi penghasil. Sebagai organisasi penghasil, UPTD Terminal Angkutan tentunya memiliki target yang harus dicapai. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2000

Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentasi (%)	Rata- rata (%)
Retribusi Bedak	15.000.000,00	11.857.000,00	79	79,9
Retribusi Peron	36.000.000,00	28.850.600,00	80	
Retribusi Kendaraan				
- Bus	96.360.000,00	81.746.000,00	84,8	
- MPU	25.000.000,00	18.532.200,00	74,1	
- Angkot	35.587.500,00	28.781.500,00	80,8	
- Parkir Terminal	65.000.000,00	52.693.000,00	81	

Sumber Data: UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

Tabel di atas menunjukkan hasil pelaksanaan kegiatan penarikan atau pemungutan retribusi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Retribusi Bedak

Pada bagian retribusi bedak untuk periode tahun 2000 ditargetkan memperoleh hasil Rp 15.000.000,00 dan terealisasi Rp 11.857.000,00 sehingga prosentasi dari jenis retribusi ini adalah 79%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakai jasa yang sedikit menurun serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Bagian Retribusi Peron

Pada bagian retribusi peron untuk periode tahun 2000 ditargetkan memperoleh hasil Rp 36.000.000,00 dan terealisasi Rp 28.850.600,00 sehingga prosentasi dari jenis retribusi ini adalah 80%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakai jasa yang sedikit menurun serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

3. Bagian Retribusi Kendaraan

Pada bagian retribusi kendaraan yang terdiri dari:

- Retribusi Bus ditargetkan Rp 96.360.000,00 dan terealisasi Rp 81.746.000,00 sehingga prosentasi pemenuhannya adalah 84,8%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakai jasa yang sedikit menurun serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Retribusi MPU ditargetkan Rp 25.000.000,00 dan terealisasi Rp 18.532.200,00 sehingga prosentasi pemenuhannya adalah 74,1%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakai jasa yang sedikit menurun serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Retribusi Angkot ditargetkan Rp 35.587.500,00 dan terealisasi Rp 28.781.500,00 sehingga prosentasi pemenuhannya adalah 80,8%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakai jasa yang sedikit menurun serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Retribusi Parkir Terminal ditargetkan Rp 65.000.000,00 dan terealisasi Rp 52.693.000,00 sehingga prosentasi pemenuhannya adalah 81%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakai jasa yang sedikit menurun serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dari kegiatan penarikan atau pemungutan retribusi bedak, peron dan kendaraan di atas, keberhasilan dari realisasi ketiga jenis retribusi tersebut jika diambil rata-ratanya adalah terealisasi 79,9%. Hal ini disebabkan karena jumlah pemakai jasa yang sedikit menurun serta adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa keberhasilan dalam merealisasikan target dari ketiga jenis retribusi yang dikelola oleh UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri yaitu sebesar 79,9%. Hal tersebut menandakan realisasi belum bisa sepenuhnya atau belum maksimal.

Setelah mengadakan observasi, penulis melihat bahwa kekurangan pencapaian target di atas disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari luar organisasi dan faktor dari dalam organisasi. Faktor dari luar organisasi yaitu fluktuatifnya jumlah pemakai

jasa yang disediakan oleh UPTD Terminal Angkutan. Dan faktor dari dalam organisasi yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut diantaranya menarik retribusi tanpa memberi karcis, karcis retribusi tidak dirobek kemudian disetor kembali ke loket pembayaran. Sehingga terjadi kebocoran-kebocoran yang mengakibatkan pencapaian target kurang maksimal. Untuk memfokuskan penelitian agar sesuai dengan pokok bahasannya maka penulis membatasi pada faktor yang berasal dari dalam organisasi yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.

Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut diperlukan suatu tindakan oleh pimpinan untuk mencegah timbulnya penyimpangan yang akan menghambat kelancaran proses pencapaian tujuan organisasi. Tindakan pimpinan yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan dan penyimpangan tersebut adalah melakukan pembenahan fungsi-fungsi manajemen. Adapun definisi manajemen menurut Stoner (dalam Handoko, 1998:8) yaitu :

”Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Adapun ada tiga alasan diperlukannya manajemen menurut Handoko (1998:6) yaitu:

1. untuk mencapai tujuan
2. untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
3. untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu efektivitas pelaksanaan kerja pegawai, pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain

perencanaan, pembagian kerja, pembinaan pegawai, koordinasi, motivasi dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Handyaningrat (1989:120) bahwa, "Fungsi manajemen seperti perencanaan, pembagian kerja, koordinasi, pembinaan pegawai, motivasi dan pengawasan merupakan unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi".

Unsur-unsur tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam kehidupan organisasi perencanaan sangat diperlukan. Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam menentukan tindakan-tindakan yang harus diambil. Adapun pengertian perencanaan menurut Manullang (1985:49) bahwa, "Perencanaan dalam aktifitas organisasi meliputi kegiatan berencana dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, dimana tindakan harus dilakukan, siapa yang harus melakukan dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan".

Penerapan perencanaan pada UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa masing-masing bagian telah membuat rencana operasional untuk pelaksanaan pekerjaan mereka.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan kegiatan yang harus dilakukan agar tidak terjadi over lapping atau penindihan kerja sehingga bisa jadi satu pekerjaan dilakukan oleh beberapa orang. Soedirdjo (1984:57) mengatakan:

Pembagian kerja yaitu pembagian tugas pokok organisasi ke dalam kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran secara berhasil guna (antara lain jangan sampai terjadi penindihan atau over lapping dalam pengelompokan kegiatan itu) sehingga kegiatan-kegiatan dalam masing-masing kelompok saling menunjang usahanya.

Pada UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri, pembagian kerja telah dipertimbangkan sesuai dengan ketrampilan, keahlian maupun pendidikannya. Pembagian tugas pokok telah ditetapkan secara jelas.

c. Pembinaan Pegawai

Pembinaan merupakan suatu proses belajar untuk mengembangkan pengetahuan dan kecakapan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menjadi lebih efektif. Dalam kehidupan yang semakin maju pembinaan pegawai sangat diperlukan. Adapun pengertian dari pembinaan menurut Murdjono(1986:12) yaitu:

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan tidak melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dengan tujuan membuat orang-orang yang menjalankannya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Untuk meningkatkan kualitas pegawainya dalam melaksanakan pekerjaannya UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri telah mengadakan pembinaan pegawai.

d. Motivasi

Untuk meningkatkan prestasi kerja diperlukan motivasi. Motivasi akan mendorong seseorang untuk menjadi lebih efektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Motivasi dapat berupa macam-macam misalkan komunikasi yang baik, pemberian penghargaan. Berkaitan dengan motivasi ini Soemitro (1987:54) berpendapat bahwa motivasi adalah:

1. Dapat berkomunikasi dengan bawahan
2. Memberikan penghargaan kepada pegawai atas prestasinya
3. Menciptakan pergaulan kerja yang harmonis.

Untuk meningkatkan prestasi bawahannya, kepala UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri memberikan motivasi baik itu dengan

pemberiaan penghargaan maupun dengan berkomunikasi yang baik antara atasan dan bawahan.

e. Koordinasi

Koordinasi adalah kesatuan tindakan dari bagian yang satu dengan yang lain dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Adapun pengertian koordinasi menurut Sarwoto (1988:17) yaitu:

Koordinasi adalah kesatuan tindakan terhadap masing-masing bagian anantara satu dengan yang lainnya dan pelaksanaan usaha-usaha atau aktifitas (kegiatan) beserta gerak operasinya agar mereka dapat memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi berhasilnya suatu usaha bersama.

Pada UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri koordinasi telah berjalan dengan baik dilihat dengan adanya kesatuan dan keselarasan aktivitas masing-masing bagian maupun seluruh bagian.

f. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah dijalankan sesuai dengan rencana. Berkaitan dengan hal di atas Handyaningrat (1989:141) mengemukakan bahwa, "Pengawasan pimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang ditentukan".

Mengingat keterbatasan penulis, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada pengawasan dengan " *ceteris paribus* " faktor-faktor yang lain yang turut serta mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Hal ini sesuai dengan pendapat Hatta (1970 : 6) sebagai berikut :

Bahwa hal-hal lain yang menjadi sebab keadaan itu sementara tidak berubah dan hal yang lain tidak mengganggu kedudukan keadaan itu, sebab kalau hal-hal menjadi berubah, sudah barang tentu berubah pula jadinya. Sebab ilmu di dalam keterangannya senantiasa mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut: kalau yang selainnya tidak berubah, syarat-syarat ini biasa disebut dengan perkataan " *ceteris paribus* ".

Kegiatan pengawasan sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Pengawasan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas kerja pegawai, maka dari itu pengawasan perlu dilaksanakan untuk menjamin adanya keserasian antara pelaksanaan tugas dengan hasil pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (1990 : 16) bahwa, " Pengawasan adalah kegiatan mengusahakan agar pelaksanaan serta hasil kerja dapat sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan ".

Selain itu pengawasan juga mempunyai pengaruh terhadap sikap mental para bawahan sebagai pelaksana dari pekerjaan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Handyaningrat (1989:189) sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaannya;
2. Mendidik para pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;
3. Mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi lagi kerugian yang tidak diinginkan;
4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan.

Selanjutnya seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam suatu organisasi tidak terlepas dari kedudukan, peranan dan tugas-tugas pimpinan dan bawahan. Keduanya juga dipandang sebagai sumber daya utama bagi sebuah organisasi. Peran pimpinan amatlah besar dalam suatu organisasi karena pimpinan merupakan titik sentral penggerak yang menentukan disamping itu seorang pimpinan juga bertanggung jawab penuh atas seluruh aktifitas serta pelaksanaan tugas organisasi. Supaya seluruh aktifitas serta pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka perlu diadakan pengawasan oleh pimpinan. Selanjutnya menurut Handyaningrat (1989:141)

bahwa,"Pengawasan pimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan".

Kegiatan pengawasan sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Pengawasan yang dilakukan dalam suatu organisasi pemerintahan amat penting supaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini seperti telah ditegaskan oleh Musanef (1989:204). "Dalam setiap organisasi pemerintah fungsi pengawasan sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna".

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan, bahwa setiap pelaksanaan aktifitas organisasi tujuannya dapat tercapai secara efektif apabila dalam penyelenggaraannya diwarnai oleh aktifitas pengawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Handyaningrat (1988:150) yang menyatakan bahwa,"Pengawasan adalah fungsi pimpinan yang fundamental (pokok) dalam menciptakan efektifitas pelaksanaan aktifitas organisasi". Selain pentingnya fungsi pengawasan tersebut di atas, maka pengawasan juga bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan organisasi tercermin pada keberhasilan organisasi itu dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemimpin harus mampu mengadakan pengawasan yang efisien kepada bawahannya. Sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan maka dapat diusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan sesuai dengan rencana yang dikehendaki. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sarwoto (1986:94) sebagai berikut,"Rencana yang bagaimanapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana pemimpin tidak melakukan pengawasan". Adapun kegiatan

Tabel 4. Kegiatan Pengawasan Kepala UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

Bulan	Frekuensi tiap bidang yang diawasi						Tar get	Prosen target (%)	Reali sasi	Prosen hasil (%)	Rata- rata (%)
	Pos siaran	R. Bedak	Keam anan	R. Peron	TU	R. Ken- daraan					
Jan	1	2	1	3	1	3	18	100	11	61,1	77,7
Feb	1	3	1	3	2	4	18	100	14	77,7	
Mar	2	4	1	4	1	3	18	100	15	83,3	
Apr	1	4	2	3	2	4	18	100	16	88,8	
Mei	2	4	1	3	1	4	18	100	15	83,3	
Jun	1	3	2	4	2	2	18	100	14	77,7	
Jul	2	2	2	4	2	4	18	100	16	88,8	
Agst	1	2	1	2	1	2	18	100	9	50	
Sep	1	3	1	4	1	3	18	100	13	72,2	
Okt	2	4	2	2	2	4	18	100	16	88,8	
Nop	2	4	2	4	1	3	18	100	16	88,8	
Des	1	3	1	3	2	3	18	100	13	72,2	

Sumber data : UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

Dari tabel di atas menunjukkan pengawasan yang dilakukan oleh kepala UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2000 target yang ditetapkan adalah 18 kali pengawasan pada tiap bulannya untuk semua bagian yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pos siaran

Pada bidang pos siaran target yang ditetapkan adalah 2 kali pengawasan dalam satu bulan yaitu 1 kali pengawasan langsung dan 1 kali pengawasan tidak langsung. Pada bulan Maret, Mei, Juli, Oktober dan Nopember pengawasan yang dilakukan untuk bidang pos siaran telah memenuhi target yaitu sebanyak 2 kali

langsung. Pada bulan Maret, Mei, Juli, Oktober dan Nopember pengawasan yang dilakukan untuk bidang pos siaran telah memenuhi target yaitu sebanyak 2 kali pengawasan, akan tetapi pada bulan Januari, Februari, April, Juni, Agustus, September dan Desember belum dapat memenuhi target yaitu hanya terlaksana 1 kali pengawasan.

2. Retribusi bedak

Pada bidang retribusi bedak target yang ditetapkan adalah 4 kali pengawasan dalam satu bulan yaitu 3 kali pengawasan langsung dan 1 kali pengawasan tidak langsung. Pada bulan Maret, April, Mei, Oktober dan Nopember pengawasan yang dilakukan untuk bidang retribusi bedak telah memenuhi target yaitu sebanyak 4 kali pengawasan, akan tetapi pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September dan Desember belum dapat memenuhi target yaitu antara 2 - 3 kali pengawasan.

3. Keamanan

Pada bidang keamanan target yang ditetapkan adalah 2 kali pengawasan dalam satu bulan yaitu 1 kali pengawasan langsung dan 1 kali pengawasan tidak langsung. Pada bulan April, Juni, Juli, Oktober dan Nopember pengawasan yang dilakukan untuk bidang keamanan telah memenuhi target yaitu sebanyak 2 kali pengawasan, akan tetapi pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, September dan Desember belum dapat memenuhi target yaitu hanya terlaksana 1 kali pengawasan.

4. Retribusi Peron

Pada bidang retribusi peron target yang ditetapkan adalah 4 kali pengawasan dalam satu bulan yaitu 3 kali pengawasan langsung dan 1 kali pengawasan tidak langsung. Pada bulan Maret, Juni, Juli, September dan Nopember pengawasan yang dilakukan untuk bidang retribusi peron telah memenuhi target yaitu sebanyak 4 kali pengawasan, akan tetapi pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Agustus, Oktober dan Desember belum dapat memenuhi target yaitu antara 2 - 3 kali pengawasan.

5. Tata Usaha

Pada bidang tata usaha target yang ditetapkan adalah 2 kali pengawasan dalam satu bulan yaitu 1 kali pengawasan langsung dan 1 kali pengawasan tidak langsung. Pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Oktober dan Desember pengawasan yang dilakukan untuk bidang tata usaha telah memenuhi target yaitu sebanyak 2 kali pengawasan, akan tetapi pada bulan Januari, Maret, Mei, Agustus, September, dan Nopember belum dapat memenuhi target yaitu hanya terlaksana 1 kali pengawasan.

6. Retribusi Kendaraan

Pada bidang retribusi kendaraan target yang ditetapkan adalah 4 kali pengawasan dalam satu bulan yaitu 3 kali pengawasan langsung dan 1 kali pengawasan tidak langsung. Pada bulan Februari, April, Mei, Juli, dan Oktober pengawasan yang dilakukan untuk bidang retribusi kendaraan telah memenuhi target yaitu sebanyak 4 kali pengawasan, akan tetapi pada bulan Januari, Maret, Juni, Agustus, September, Nopember dan Desember belum dapat memenuhi target yaitu antara 2 – 3 kali pengawasan.

Sehubungan dengan masalah pengawasan ini maka berdasarkan pada aspek cara pengawas dalam menginspeksi, memeriksa obyek yang diawasi sebagaimana dikatakan oleh Sujamto (1986:76) dibedakan menjadi dua yaitu Pengawasan Langsung (Direct Control) dan Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control).

1. Pengawasan langsung

Yang dimaksud pengawasan langsung menurut Sujamto (1986:76-77) adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Dengan demikian pimpinan atau perangkat pengawasan dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi ataupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

2. Pengawasan tidak langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung menurut Sujamto (1986:76-77) adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi, atau tegasnya dilakukan dengan jarak jauh, yaitu dari belakang meja. Caranya ialah dengan mempelajari dan menganalisis segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi.

Jadi pengawasan langsung merupakan kegiatan untuk secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan dari dekat yang perlu dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Sedangkan pengawasan tidak langsung itu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Caranya ialah dengan mempelajari dan menganalisis laporan-laporan yang menyangkut obyek yang diawasi atau melalui laporan atau keterangan secara lisan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan kemungkinannya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kerja pegawai di kantor UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul sebagai berikut:

“Hubungan Antara Pengawasan Pimpinan (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Angkutan) Dengan Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri”

1.2 Perumusan Masalah

Suatu penelitian dapat dikatakan ilmiah, apabila penelitian tersebut sesuai dengan prosedur. Masalah yang ada harus dirumuskan terlebih dahulu secara tegas, hal ini dimaksudkan untuk membentuk perumusan data yang selanjutnya akan mempermudah dalam perumusan hipotesis. Dengan demikian data yang terkumpul

akan dapat relevan dengan permasalahan yang dapat diteliti yang kemudian akan memudahkan analisis data. Dalam penelitian yang baik harus dapat menyelesaikan permasalahan pada akhir penelitiannya. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Arikunto (1991:48) bahwa, "Masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang jawabannya akan diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan, yaitu pada kesimpulan".

Menurut A.A. Loedin, syarat-syarat untuk merumuskan masalah yang baik adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih.
2. Persoalan harus ditegaskan dalam bahasa yang jelas dan untuk memudahkan dituangkan dalam kalimat tanya.
3. Persoalan harus memungkinkan pengukuran secara empiris.

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang diambil penulis adalah sebagai berikut :

"Adakah Hubungan Antara Pengawasan Pimpinan (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Angkutan) Dengan Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri".

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Segala aktifitas yang dilakukan peneliti pasti mempunyai maksud tujuan tertentu, yang memberikan arah bagi pelaksanaan aktifitas tersebut.

Menurut Arikunto (1993:90) yang dimaksud tujuan penelitian yaitu, "Tujuan penelitian merupakan perumusan kalimat yang ingin diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya sesuatu yang diperoleh merupakan tujuan penelitian, tujuan tersebut sama dengan jawaban dari permasalahan penelitian."

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.
2. Ingin mengetahui efektivitas pelaksanaan kerja pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Kota Kediri.
3. Ingin mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengawasan pimpinan (Kepala UPTD Terminal Angkutan) dengan efektivitas pelaksanaan kerja pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan atau sumbangan pemikiran atau saran-saran demi peningkatan atau kemajuan bagi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Kediri, khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Angkutan.
2. Diharapkan memberikan sumbangan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

1.4 Kerangka Teori

Dalam rangka kegiatan penelitian mulai dari awal sampai akhir harus mengikuti kerangka pemikiran yang utuh guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dalam bentuk perumusan masalah. Dalam upaya membahas masalah diperlukan suatu konsep atau pandangan teoritis yang jelas dan benar. Untuk itu keberadaan suatu teori sangat membantu karena teori menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1990 : 37) adalah sebagai berikut,” Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi, untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep “.

Dari rumusan teori diatas dapat dikatakan bahwa kedudukan konsep mempunyai peranan strategis karena menjadi modal dasar dalam menyusun teori dan menangkap gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1990 : 33) yang dimaksud konsep adalah serangkaian abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sekelompok karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Jadi peranan konsep sangat penting karena menghubungkan dunia observasi dan dunia teori atau antara abstraksi dan realita, sekaligus sebagai modal utama dalam membuat kerangka teori untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Manusia sebagai makhluk sosial akan bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuannya. Hal ini diwujudkan dengan membentuk organisasi. Sondang P Siagian menyatakan bahwa organisasi adalah, "Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan dimana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan".

Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa organisasi adalah, "Struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu".

Dari pendapat di atas, organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerja sama secara koordinatif untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses kerja sama antara bawahan dengan atasan tersebut diperlukan tindakan-tindakan manajemen untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran dan pencapaian efektivitas kerja pegawai dalam organisasi.

Adapun menurut sifatnya organisasi ada dua yaitu organisasi yang bersifat publik dan organisasi yang bersifat privat. Organisasi publik menurut Hasibuan (2000:6) adalah organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan, sedangkan prinsip kegiatannya adalah pengabdian sosial. Sedangkan organisasi privat atau perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya ekonomis rasional.

Setiap organisasi pasti menginginkan tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan maka diperlukan kegiatan-kegiatan manajemen. Manajemen diperlukan karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Adapun definisi manajemen menurut Stoner (Handoko, 1998:8) yaitu:

”Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”

Keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi adalah tercapainya sasaran-sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Organisasi dikatakan telah efektif apabila tugas-tugas dan hasilnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun efektivitas menurut Emerson (dalam Handayani 1989 : 16) bahwa, ”Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya berarti efektif”.

Agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan rencana, maka diperlukan adanya pegawai yang memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pegawai dituntut untuk mampu mencapai efektivitas kerja yang tinggi, yang akhirnya akan berdampak pada efektivitas organisasi. Artinya efektivitas pelaksanaan kerja dari pegawai.

Adapun pengertian dari efektivitas kerja menurut Pariatra Westra (1989 : 83) adalah sebagai berikut, ”Efektivitas kerja adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pegawai atau karyawan yang dapat menimbulkan suatu akibat terwujudnya sesuai dengan ketentuan rencana yang ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan mengenai ukuran tentang sejauh mana pelaksanaan kerja dikatakan efektif, dalam penelitian ini penulis mencoba mengukur efektivitas kerja pegawai berdasarkan pendapat Hidayat (1986:87) yang menyatakan bahwa, "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya".

Tidak semua organisasi dapat mencapai tingkat efektivitas organisasi yang tinggi. Dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi masih saja terdapat adanya penyimpangan yang mengakibatkan pencapaian tujuan organisasi mengalami hambatan. Untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang menghambat efektivitas organisasi, maka menjadi tugas pimpinanlah untuk mencegah dan mengatasinya. Peran pimpinan amatlah besar dalam suatu organisasi karena pimpinan merupakan titik sentral penggerak yang menentukan disamping itu seorang pimpinan juga bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas serta pelaksanaan tugas organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat Miftah Thoha (1983:7) bahwa, "Organisasi akan berhasil atau gagal sebagian besar sangat tergantung dan ditentukan oleh pimpinan dan pimpinanlah yang bertanggung jawab atas kegagalan dari pelaksanaan suatu pekerjaan".

Supaya seluruh aktivitas serta pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, maka perlu diadakan pengawasan oleh pimpinan. Selanjutnya Handayani (1998:141) mengemukakan bahwa, "Pengawasan pimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan".

Pengawasan sangat diperlukan bagi organisasi. Mussanef (1989:204) mengatakan bahwa, "Dalam organisasi terutama dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk

menjamin adanya keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Adapun berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi menurut Hani Handoko sebagai berikut:

1. Perubahan Lingkungan Organisasi

Melalui fungsi pengawasan, pimpinan mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau menciptakan kesempatan dari perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan Kompleksitas Organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan lebih formal, lebih efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai sesuai rencana.

3. Kesalahan-kesalahan

Sistem pengawasan memungkinkan pimpinan mendeteksi kesalahan yang dilakukan pegawai sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan Pimpinan Untuk Mendelegasikan Wewenang

Bila pimpinan mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab pimpinan tidak berkurang. Satu-satunya cara pimpinan untuk menentukan pegawai telah melaksanakan tugas yang dilimpahkan adalah mengimplimentasikan sistem pengawasan.

Sedangkan pengertian pengawasan menurut The Liang Gie (1990:16) yaitu, "Pengawasan adalah kegiatan mengusahakan agar pelaksanaan serta hasil kerja dapat sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan".

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian pengawasan sebagai berikut:

“pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik

sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku”.

Tujuan suatu organisasi akan tercapai bila pegawai bekerja sesuai dengan tata kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin pegawai telah melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya, maka menjadi tugas pimpinanlah untuk mengadakan pengawasan. Menurut Sukarno K (1985:109) tujuan diadakan pengawasan oleh pimpinan terhadap pegawai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan yang dilakukan pegawai berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu itu dilaksanakan oleh pegawai sesuai dengan instruksi.
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan yang dialami pegawai dalam bekerja.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien.
5. Untuk mencari jalan keluar bila dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan menuju kearah perbaikan.

Sedangkan Handayani (1989:189) mengemukakan tujuan pengawasan terhadap pegawai adalah sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan tugas.
2. Mencegah terjadinya penyimpangan agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.
3. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawai bertujuan agar tercapai efektivitas kerja pegawai dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani (1989 : 150) yang menyatakan bahwa, “ Pengawasan adalah fungsi

pimpinan yang fundamental (pokok) dalam menciptakan efektivitas pelaksanaan aktivitas organisasi”.

Selanjutnya Ranupundojo (1989:4) juga mengemukakan bahwa, “ Esensi pengawasan adalah mengamati, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan sehingga bawahan mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dengan demikian sasaran dari pengawasan adalah meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Dalam hal ini pimpinan harus mampu mengadakan pengawasan yang efektif dan efisien kepada bawahannya. Sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan pimpinan dapat diusahakan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksakan bawahan sesuai dengan rencana yang dikehendaki. Hal ini seperti diungkapkan Sarwoto (1986:94) sebagai berikut,” Rencana yang bagaimanapun baiknya akan gagal sama sekali bila mana pimpinan tidak melakukan pengawasan”.

Sehubungan dengan pengawasan ini maka berdasarkan pada aspek cara pengawas dalam menginspeksi, memeriksa obyek yang diawasi sebagaimana dikatakan oleh Sujamto (1986:76) dibedakan menjadi dua, yaitu : (1) Pengawasan Langsung (Direct Control); (2) Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control).

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung menurut Sujamto (1986:76-77).

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Dengan demikian pimpinan atau perangkat pengawasan dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi ataupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi, atau tegasnya dilakukan dengan jarak jauh,

yaitu dari belakang meja. Caranya ialah dengan mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi.

Berdasarkan uraian diatas maka yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut sesuai dengan perumusan masalah yang penulis ajukan adalah :

1. Konsep pengawasan pimpinan
2. Konsep efektivitas kerja.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan konsep-konsep yang penulis ketengahkan dalam penelitian ini.

1.4.1 Konsep Pengawasan Pimpinan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh pimpinan. Untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan hambatan-hambatan yang kemungkinan terulang kembali dalam pencapaian suatu tujuan organisasi maka menjadi tugas pimpinanlah untuk mengadakan pengawasan. Karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi adalah menjadi tanggung jawab pimpinan.

Selanjutnya menurut Handayani (1989:141) mengemukakan bahwa, "Pengawasan pimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu tugas pimpinan untuk memastikan dan menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan pentingnya pelaksanaan pengawasan, seperti yang ditegaskan oleh Musanef (1989 : 204) bahwa, " Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna".

Sehubungan dengan masalah pengawasan, berdasarkan pada aspek cara pengawas dalam menginspeksi, memeriksa obyek yang diawasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sujamto (1986 : 76) dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai, pimpinan perlu mengadakan pengawasan baik itu pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

1.4.1.1 Pengawasan Langsung

Yang dimaksud pengawasan langsung menurut Sujamto (1986 : 76) adalah, "Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melaksanakan pemeriksaan ditempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi". Dengan demikian pimpinan atau perangkat pengawas dapat melihat dan mengawasi sendiri bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi ataupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

Agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur maka pimpinan perlu mengadakan pengawasan langsung dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat obyek yang sedang diawasi. Dengan cara demikian pimpinan dapat mengetahui secara langsung bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan apabila terjadi hambatan pimpinan dapat secara langsung memberikan petunjuk. Pengawasan langsung merupakan cara efektif untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

1.4.1.2 Pengawasan Tidak Langsung

Keberhasilan organisasi tercermin dalam keberhasilan melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pimpinan harus mampu melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien kepada bawahannya. Sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, dapat diusahakan

pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Terlepas dari pengawasan yang menjadi fungsi pokok (fundamental) dari seorang pimpinan, pimpinan juga harus melaksanakan tugas yang begitu banyak dan kompleks, terutama dalam organisasi yang besar. Sehingga seorang pimpinan sering kali tidak dapat menjalankan pengawasan langsung karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang tidak langsung.

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung menurut Sujamto (1986:77) adalah, "Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Caranya ialah dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi".

Dalam hal ini pimpinan tidak mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan akan tetapi pimpinan mengawasi dari belakang meja artinya pimpinan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi. Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan pimpinan akan meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut.

1.4.2 Konsep Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai

Setiap individu pegawai dapat dikatakan sebagai pihak yang paling menentukan efektivitas organisasi. Pegawai merupakan harta yang sangat berharga bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kerja adalah para pegawai. Dengan demikian proses pelaksanaan kegiatan yang menyangkut bidang kerja masing-masing merupakan cikal-bakal dari efektivitas organisasi. Berbicara mengenai efektifitas kerja berarti membicarakan akibat atau efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh The Liang Gie (1991:25) adalah :

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan

suatu perbuatan dengan maksud-maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Sedangkan pengertian dari efektifitas pelaksanaan kerja dikemukakan oleh Westra (1987:81) sebagai berikut:

Efektifitas pelaksanaan adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang pegawai, karyawan yang dapat menimbulkan suatu akibat terwujudnya tujuan sesuai dengan ketentuan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari kedua pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kerja yang dilakukan pegawai akan memberikan suatu akibat terhadap organisasi dimana mereka bekerja. Organisasi UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintahan Kota Kediri, disamping sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sebagai organisasi yang bertugas memungut retribusi yang mempunyai suatu tujuan, dan pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai dengan efektif yaitu sesuai dengan rencana ataupun ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba mengukur efektivitas kerja pegawai berdasarkan pendapat Hidayat (1986:87) yang menyatakan bahwa, "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai, semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya".

Berdasarkan dari uraian beberapa konsep tentang efektivitas di atas maka penulis menetapkan bahwa konsep efektivitas mempunyai tiga cakupan sub konsep yang diharapkan dapat dijadikan sub variabel dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Kuantitas kerja
- b. Kualitas kerja
- c. Efektivitas waktu

a. *Kuantitas Kerja*

Menurut Wilson dan Heyel (1987:101) yang dimaksud kuantitas kerja adalah, "Hal-hal yang menunjukkan jumlah kerja yang dilaksanakan dalam periode yang telah ditentukan". Dengan demikian kuantitas kerja mengacu pada banyaknya hasil kerja yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditentukan, sekaligus menunjukkan kecepatan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. *Kualitas Kerja*

Kualitas kerja menurut Wilson dan Heyel (1987:101) adalah, "Hal-hal yang menunjukkan bagaimana sebaiknya ia melakukan apa yang ia kerjakan, ketepatan, kelengkapan dan kerapian". Kualitas mengacu pada mutu kerja seseorang dalam melaksanakan kerjanya yang ditandai oleh ketepatan, kelengkapan dan kemampuan kerjanya. Hal ini juga dapat dilihat dari ketelitian dan ketepatan pegawai dalam melaksanakan atau menyelesaikan setiap tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas.

c. *Efektivitas waktu*

Efektivitas menurut waktu adalah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan menurut sumber dan cara kerja tertentu yang memadai. Efektivitas waktu merupakan sesuatu yang dapat diperkirakan dan ditentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sehubungan dengan efektivitas menurut waktu, Setiawan (1987:16) mengatakan sebagai berikut.

Tidak seluruh waktu yang dialokasikan digunakan. Dalam arti bahwa pekerjaan tertentu dapat diselesaikan lebih cepat dari jatah waktu yang ditetapkan, juga bahkan batas waktu yang ditetapkan benar-benar ditarik yang berarti pekerjaan diselesaikan tepat pada waktunya.

Jadi yang dimaksud efektivitas waktu adalah apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan pada waktunya atau bahkan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.

1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara. Karena itu penggunaan hipotesis harus didasarkan pada permasalahan dan tujuan dari suatu penelitian. Hipotesis diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya (Hadi,1987:257).

Selanjutnya Singarimbun dan Effendi (1989:43) menyatakan bahwa:

Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk suatu pernyataan yang menghubungkan antara 2 variabel atau lebih, hubungan tersebut dirumuskan secara eksplisit dan implisit. Hipotesis tersebut menunjukkan hubungan 2 variabel yaitu variabel pengaruh dan variabel terpengaruh.

Sedangkan dalam buku Metodologi Penelitian yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi halaman 38 menyebutkan:

Konsep lain mengenai hipotesis adalah hipotesis nol. Hipotesis nol (H_0), adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya saling hubungan antara 2 variabel atau lebih, atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Di dalam statistik, uji statistik biasanya mempunyai sasaran untuk menolak kebenaran hipotesis nol ini. Hipotesis lain yang bukan hipotesis nol adalah hipotesis alternatif (H_a), yang menyatakan adanya saling hubungan antara 2 variabel atau lebih. Pada umumnya, kesimpulan uji statistik berupa penerimaan hipotesis alternatif sebagai hal yang benar.

Selanjutnya dalam Metodologi Penelitian yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi halaman 38-39 juga menyebutkan:

Seringkali timbul pertanyaan mengenai mana diantara kedua macam hipotesis itu, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), yang harus dirumuskan sebagai hipotesis penelitian. Jawaban terhadap pertanyaan ini akan tergantung kepada landasan teoritis yang digunakan. Jika landasan teoritis itu mengarahkan penyimpulannya ke "tidak ada hubungan" atau ke "tidak ada perbedaan", maka hipotesis penelitian yang dirumuskan akan merupakan hipotesis nol. Sebaliknya, jika tinjauan teoritis mengarahkan

penyimpulan ke”ada hubungan” atau ke”ada perbedaan”,maka hipotesis penelitian yang dirumuskan merupakan hipotesis alternatif (H_a).

Berdasarkan uraian tersebut,karena landasan teoritis itu mengarah kepada penyimpulan ke”ada hubungan” maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah hipotesis alternatif (H_a). Dengan demikian hipotesis dapat dirumuskan yakni H_a :

Semakin sering Pengawasan Pimpinan dilaksanakan maka semakin tinggi Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan salah satu unsur yang penting dalam penelitian, dimana definisi operasional merupakan petunjuk dalam pengukuran variabel. Agar konsep yang ada dapat diterapkan atau dioperasionalisasikan dengan jelas dan mudah dalam penulisan, maka perlu adanya penjabaran pengertian, penentuan standart pengukuran dan penganalisisan tertentu dari konsep yang ada.

Pengertian definisi operasional menurut Singarimbun dan Effendi (1989:46) yaitu, ”Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel.”

Definisi operasional akan dapat memperjelas peneliti untuk mengukur variabel penelitiannya. Jadi definisi operasional adalah menentukan gejala-gejala untuk hal-hal khusus dari suatu variabel dan bagaimana kita mengukur gejala tersebut.

Dari uraian di atas, maka untuk membatasi secara tegas variabel dari penulisan ini akan dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1. Operasionalisasi variabel pengaruh (X) yaitu, Pengawasan Pimpinan (kepala UPTD Terminal Angkutan) Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.
2. Operasionalisasi variabel terpengaruh (Y) yaitu, Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.

1.6.1 Operasionalisasi Variabel Pengaruh (X) yaitu, Pengawasan Pimpinan (Kepala UPTD Terminal Angkutan) Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

Sehubungan dengan masalah pengawasan ini Sujamto mengemukakan mengenai sistem pengawasan berdasarkan pada aspek cara pengawas dalam menginspeksi, memeriksa obyek yang diawasi adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung (Direct Control)
2. Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control)

Berdasarkan pendapat Sujamto di atas maka penulis menetapkan indikator dari pengawasan pimpinan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung (X1)
2. Pengawasan Tidak Langsung (X2)

Selanjutnya penulis akan mengemukakan indikator-indikator pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung (X1)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengawasan langsung menurut Sujamto (1986:76) adalah sebagai berikut :

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Dengan demikian pimpinan atau perangkat pengawasan dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi ataupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

Dari pengertian di atas maka item-item yang dapat diambil adalah:

- Datang langsung ditempat pelaksanaan pekerjaan;
- Memeriksa hasil pekerjaan pegawai;
- Memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut jalannya pekerjaan;

2. Pengawasan Tidak Langsung (X2)

Mengenai pengawasan tidak langsung ini Sujamto (1986:77) mengemukakan sebagai berikut:

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi, atau tegasnya dilakukan dengan jarak jauh yaitu dari belakang meja. Caranya ialah dengan mempelajari dan menganalisis segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi.

Dari pendapat di atas maka item-item yang dapat diambil yaitu:

- Menganalisis laporan-laporan mengenai hasil pekerjaan;
- Menilai kebenaran dari laporan atau dokumen tentang hasil pekerjaan.

1.6.2 Operasionalisasi Variabel Terpengaruh (Y) yaitu, Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

Keberhasilan pelaksanaan tugas adalah tercapainya sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi apabila rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya telah terpenuhi maka dikatakan efektif. Adapun pengertian efektivitas kerja menurut Pariatra Westra (1986:83) yaitu, "Efektivitas kerja adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pegawai atau karyawan yang dapat menimbulkan suatu akibat terwujudnya sesuai dengan ketentuan rencana yang ditetapkan sebelumnya".

Sedangkan untuk mengukur efektivitas kerja, dalam penelitian ini penulis mengukur efektivitas kerja sesuai dengan konsep yang dikatakan Hidayat (1986:87) yang menyatakan bahwa, "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, semakin besar prosentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya".

Berdasarkan dari konsep tersebut maka indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Kuantitas Kerja*

Menurut Wilson dan Heyel (1987:101) yang dimaksud kuantitas kerja adalah, " Hal-hal yang menunjukkan jumlah kerja yang dilaksanakan dalam periode yang telah ditentukan".

Dengan demikian kuantitas kerja dapat diukur melalui item sebagai berikut:

- Banyaknya tugas atau pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. *Kualitas Kerja*

Kualitas kerja menurut Wilson dan Heyel (1987:101) adalah, " Hal-hal yang menunjukkan bagaimana sebaiknya ia melakukan apa yang ia kerjakan, ketepatan, kelengkapan dan kerapian".

Dengan demikian kualitas kerja dapat diukur melalui item-item sebagai berikut:

1. Aktifitas pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan pegawai atas ketepatan kerjanya.
2. Aktifitas pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan pegawai atas kelengkapan kerjanya.
3. Aktifitas pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan pegawai atas kerapian kerjanya.

c. *Efektivitas waktu*

Efektivitas waktu adalah apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan pada waktunya atau bahkan mungkin juga pekerjaan itu dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan.

Dengan demikian efektivitas waktu dapat diukur melalui item-item sebagai berikut :

1. Aktivitas pelaksanaan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Ativitas pelaksanaan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya untuk memudahkan pengukuran variabel-variabel yang terbagi dalam beberapa indikator diatas, maka dalam memberikan nilai atau skor jawaban responden dari masing-masing item yang tersaji digunakan kriteria pengukuran sebagai berikut:

1. Bila responden menjawab a diberi nilai skor 1
2. Bila responden menjawab b diberi nilai skor 2
3. Bila responden menjawab c diberi nilai skor 3

Dimana untuk jawaban-jawaban itu adalah:

1. Rendah terdapat dalam jawaban a
2. Sedang terdapat dalam jawaban b
3. Tinggi terdapat dalam jawaban c

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi suatu penelitian ilmiah, dimana metode ini digunakan sebagai landasan bergerak dalam mendapatkan data-data yang obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga suatu penelitian ilmiah mempunyai kebenaran yang dapat dibuktikan dengan kenyataan lapangan.

Metodologi riset menurut Hadi (1986:4) adalah :

“Metode research sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang sangat cermat dan mengajukan syarat-syarat yang keras. Maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya.”

Jadi jelaslah bahwa penelitian merupakan penelaahan yang dilakukan melalui penyelidikan yang nyata dan sempurna dari seluruh pembuktian terhadap masalah yang dapat ditentukan, sehingga kita dapat memecahkannya.

Dengan demikian suatu penelitian khususnya dalam ilmu empirik pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran

suatu pengetahuan. Dalam usaha tersebut seorang peneliti melakukannya dengan menggunakan metode ilmiah. Metode menurut Surakhmad (1985:131) yaitu, "Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu".

Berdasarkan rumusan tersebut, disimpulkan bahwa metodologi menyangkut cara kerja serta teknik-teknik yang dipergunakan untuk menguji suatu hipotesis yang di dalamnya terdapat fakta-fakta atau data yang menjadi landasan dan bukti dari setiap pemecahan masalah serta usaha-usaha untuk menganalisisnya atau mengklasifikasikan data sehingga hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya.

Berkaitan dengan uraian di atas maka dalam penelitian ini dipergunakan suatu cara atau metode sebagai berikut :

1. Penentuan Populasi
2. Metode Penentuan Sampel
3. Metode Pengumpulan Data
4. Analisis Data

1.7.1 Penentuan Populasi

Dalam melakukan penelitian, terlebih dahulu harus menentukan wilayah atau daerah yang akan dijadikan obyek suatu penelitian atau yang sering disebut populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi yang dimaksud dengan populasi adalah, "Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga". (1989:108).

Berkaitan dengan pengertian diatas dan berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dikantor UPTD Terminal Tamanan Kota Kediri, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang berjumlah 76 orang.

1.7.2 Metode Penentuan Sampel

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, seorang peneliti perlu menentukan sampel. Sampel merupakan wakil dari populasi yang akan diteliti. Pengertian sampel menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah, "Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili atau dapat merupakan contoh populasi yang dikenai penelitian". (1989:108).

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (1989:105-106) menambahkan tentang landasan yang dapat digunakan sebagai pedoman seseorang dalam pengambilan sampel dari populasi yaitu :

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari populasi seluruhnya.
2. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standart) dan terpisah dari tafsiran yang diperoleh.
3. Sederhana, sehingga mudah dilaksanakan.
4. Dapat memberikan keterangan yang sebanyak mungkin, dengan biaya yang serendah-rendahnya.

Sebenarnya tidak ada ketentuan mutlak berapa persen dari populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno hadi (1984:159) sebagai berikut, "Sebenarnya tidak ada ketetapan mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dalam suatu populasi".

Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel, mengingat cakupan obyek dan tingkatan obyek yang diawasi, maka penulis menggunakan teknik Stratified proportional random sampling. Adapun pengertian dari Stratified proportional random sampling menurut Arikunto (1996:127) adalah sebagai berikut, "Stratified proportional random sampling adalah pengambilan sampel dari setiap strata ditentukan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata yang diambil secara acak". Jumlah sample yang akan diambil berjumlah 22 orang yaitu pegawai satu tingkat dan dua tingkat di bawah pimpinan yang keseluruhannya

berjumlah 76 pegawai. Pegawai satu tingkat di bawah pimpinan terdiri dari 6 orang pegawai yaitu kasub unit pos siaran, kasub unit retribusi bedak, kasub unit retribusi keamanan, kasub unit retribusi peron, kasub unit retribusi kendaraan dan kasub unit tata usaha. Serta pegawai dua tingkat di bawah pimpinan yang terdiri dari 70 orang pegawai yaitu : pegawai pos siaran, pegawai pemungut retribusi bedak, pegawai keamanan / satpam, pegawai kebersihan, pegawai ketertiban, pegawai pemungut retribusi peron, pegawai pemungut retribusi bus, pegawai pemungut retribusi MPU, pegawai pemungut retribusi parkir terminal, pegawai pemungut retribusi angkot, pegawai pembukuan dan pegawai penyectoran. Adapun perincian sampel berdasarkan teknik stratified proportional random sampling adalah sebagai berikut :

- Untuk pegawai satu tingkat di bawah pimpinan cara penentuan sampelnya yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah pegawai satu tingkat di bawah pimpinan}}{\text{Keseluruhan jumlah pegawai}} \times \text{Jumlah sampel yang diambil}$$

$$\frac{6}{76} \times 22 = 1,73 \quad \text{menjadi 2 orang}$$

- Untuk pegawai dua tingkat di bawah pimpinan cara penentuan sampelnya yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah pegawai dua tingkat di bawah pimpinan}}{\text{keseluruhan jumlah pegawai}} \times \text{jumlah sampel yang diambil}$$

$$\frac{70}{76} \times 22 = 20,26 \quad \text{menjadi 20 orang}$$

Jadi jumlah sampel yang diambil adalah 22 orang, dengan perincian pegawai satu tingkat di bawah pimpinan, jumlah sampel yang mewakilinya adalah 2 orang. Sedangkan pegawai dua tingkat di bawah pimpinan, jumlah sampel yang mewakilinya adalah 20 orang.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan metode pengumpulan data ini, Koentjaraningrat (1991:137) menyatakan :

Bagaimana memperoleh data adalah persoalan metodologi yang khusus membicarakan teknik-teknik pengumpulan data, apakah seorang penyelidik akan menggunakan kuesioner, interview, observasi biasa, test eksperimen, koleksi atau kombinasi dari beberapa metode itu sebenarnya harus mempunyai dasar-dasar yang beralasan.

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Teknik ini memungkinkan para peneliti mengamati gejala atau fenomena obyek penelitian secara cermat. Selanjutnya yang dimaksud observasi menurut Hadi (1986:137) adalah :

Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan teknik observasi, penulis berusaha untuk mendapatkan data-data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Teknik Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Surakhmad (1987:143) yaitu, "Dokumen sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau menuliskan keterangan menurut peristiwa tersebut."

Pada dasarnya teknik ini merupakan cara untuk mendapat data-data sekunder yang melengkapi data-data primer yang telah diperoleh, dengan demikian data-data didapatkan lebih banyak sehingga data yang diperoleh lebih valid.

c. Teknik Interview atau Wawancara

Marzuki (1983:62) menyatakan bahwa, "Interview (wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada penelitian."

Jadi dengan wawancara ini peneliti dapat memperoleh data dengan cara bertanya langsung pada responden.

d. Teknik Quisioner

Menurut Koentjaraningrat (1981:87).

Quisioner adalah suatu daftar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian quisioner adalah daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden atau orang-orang yang menjawab.

Adapun daftar pertanyaan ini bersifat tertutup, dalam artian telah disediakan jawaban untuk setiap pertanyaan, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang tersedia.

1.7.4 Analisis Data

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan metode tertentu yang dapat menguji kebenaran atas suatu hipotesa yang telah dibuat sebelumnya.

Analisis data dapat dilakukan dengan dua cara, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1977:26) bahwa, "Sesungguhnya analisis ini dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan ini tergantung sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti."

Adapun yang dimaksud dengan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif menurut Koentjaraningrat (1977:328) adalah :

- a. Analisis data kualitatif, digunakan bila data yang dikumpulkan sedikit bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi.

- b. Analisis data kuantitatif, digunakan bila data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori.

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Adapun cirinya dapat dihitung dengan angka. Setelah data terkumpul dianalisis dengan statistik non parametrik yaitu korelasi Rank Spearman.

Dengan demikian untuk penghitungan analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis Rank Spearman yaitu rumus untuk mengukur hubungan antara dua variabel ordinal (Siegel, 1992:276) yaitu:

$$r_s = 1 - 6 \frac{\sum_{i=1}^N di^2}{N^3 - N}$$

Keterangan :

r_s = koefisien korelasi

N = besarnya sampel

di = perbedaan antara kedua ranking

Penggunaan rumus ini berlaku bila tidak terjadi Rank kembar.

Namun bila dijumpai Rank kembar terlalu banyak maka digunakan rumus :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di^2}{2\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

Dimana :

$$\sum X^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum Tx$$

$$\sum Y^2 = \frac{N^3 - N}{12} - \sum Ty$$

Untuk mengetahui T_x dan T_y dapat dicari dengan rumus:

$$\sum T_x = \frac{t^3 - t}{12}$$

$$\sum T_y = \frac{t^3 - t}{12}$$

Untuk menguji r_s digunakan t tes sebagai berikut:

$$t = r_s \sqrt{\frac{N-2}{1-r_s^2}}$$

Dimana : r_s = Rho (Korelasi Rank Spearman)
 D_i = defrensiasi integral (perbedaan derajat integral)
 X dan Y = Variasi antar Variabel
 T_x dan T_y = frekwensi kembar dari variabel X dan y

Hubungan antar dua variabel tersebut signifikan apabila :

- r_s hitung $>$ r_s tabel, T hitung $>$ T tabel berarti ada hubungan yang signifikan.
- r_s hitung $<$ r_s tabel, T hitung $<$ T tabel berarti tidak ada hubungan yang signifikan.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis penulis menggunakan analisis deskriptif melalui prosentase jawaban responden. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan sebagai penunjang analisis statistik di muka. Dengan demikian analisis deskriptif masih ada kaitan dengan analisis statistik. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Anto Dajan (1973:1) sebagai berikut, "Analisis secara deskriptif merupakan bagian yang menyeluruh dari metode statistik dan merupakan prosedur yang wajar di kerjakan".

Adapun pengertian dari statistik deskriptif menurut Sugiono (2000:112) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

Dari kriteria pengukuran di atas menurut sugiyono (2000:148) didasarkan ketentuan sebagai berikut:

0% - 20% kategori sangat rendah

21% - 40% kategori rendah

41% - 60% kategori sedang

61% - 80% kategori baik

81% - 100% kategori sangat baik



II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Pengantar

Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran mengenai lokasi atau daerah tempat penelitian dilakukan. Daerah yang dijadikan tempat untuk mengadakan penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.

Dengan memperhatikan deskripsi daerah penelitian akan membantu peneliti dalam memahami situasi, kondisi, wilayah kerja, program kerja, struktur organisasi, kepegawaian, permasalahan yang dihadapi dan segala hal yang bersangkutan dengan daerah penelitian ini. Dengan demikian akan memudahkan pula untuk mengumpulkan informasi dan data-data dalam meneliti suatu kegiatan penelitian.

Sedangkan gambaran sepintas mengenai daerah penelitian ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik data sekunder maupun data primer yang keduanya saling mendukung.

2.2 Gambaran singkat UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

1. Dasar Hukum

UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu unit organisasi dari organisasi dinas perhubungan, yang mana pembentukan susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri No.11 Tahun 2000 tentang struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana daerah. Serta didukung pula dengan Peraturan Daerah Kota Kediri No.13 tentang retribusi terminal yang memberikan landasan hukum kepada UPTD Terminal Angkutan dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemungutan retribusi terminal angkutan baik penumpang maupun barang.

2. *Pola Organisasi*

a. Kedudukan

UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu unit organisasi dari organisasi dinas perhubungan yang dikepalai oleh seorang kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

b. Tugas

UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas perhubungan di bidang pengelolaan, pengaturan, pengawasan, penertiban dan pemungutan retribusi terminal angkutan baik penumpang maupun barang.

c. Fungsi

UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri disamping memungut retribusi juga berfungsi sebagai publik service, sehingga UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri dituntut untuk memberikan hasil timbal balik pada masyarakat melalui pelayanan yang baik dan berkualitas dengan cara meningkatkan sarana dan pra sarana yang memadai.

2.3 Kondisi UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

1. *Keadaan Geografis*

Kota Kediri mempunyai luas wilayah 63,40 Km, terbelah Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 Km menjadi 2 (dua) wilayah yaitu :

- Barat sungai seluas 24,60 Km , yaitu Kecamatan Mojoroto.
- Timur sungai seluas 38,80 Km , yaitu Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren

Kota Kediri merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang mempunyai gunung yaitu :

- Gunung Klotok dengan ketinggian \pm 472 m;

- Gunung Mas Kumambang dengan ketinggian ± 300 m.

Wilayah administrasi terbagi dalam tiga (tiga) kecamatan, 38 desa dan 8 kelurahan, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Selatan Kabupaten Kediri;
- Sebelah Utara Kabupaten Kediri;
- Sebelah Timur Kabupaten Kediri;
- Sebelah Barat Kabupaten Kediri.

2. *Kepadatan Penduduk*

Berdasarkan hasil registrasi dari kantor stasistik Kota Kediri, pada akhir tahun 2000 jumlah penduduk Kota Kediri sebanyak 236.575 orang, terdiri dari 116.135 laki-laki dan 120.440 perempuan, dengan kepadatan penduduk rata-rata 3.732/Km.

3. *Data angkutan umum orang dan barang.*

Tabel 5. Jenis kendaraan angkutan orang dan barang di wilayah kota kediri tahun 2000

N o	Jenis kendaraan	MPU	Bus	Mobil Barang	Truk Gand	Kend. Khusus	Kend. Tempel	Kend. Tangki
1	Umum	95	326	679	704	-	-	8
2	Bukan Umum	-	20	4.041	59	9	5	18
3	Yang berubah dari umum menjadi bukan umum	-	-	12	-	-	-	-
	Jumlah	95	346	4.732	763	9	5	26

Sumber data : Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Kediri

Tabel 6. Trayek Angkutan Kota Wilayah Kota Kediri Tahun 2000

No	TRAYEK	Lyn	Jumlah
1	Ngronggo-Selomangleng	A	20
2	Katang-Selomangleng	B	9
3	Ngronggo-Putih Permai	C	6
4	Mrican-Tempurejo	D	9
5	Katang-Blabak	E	7
6	Ps. Banjaran-T.Tamanan	F	5
	Jumlah		56

Sumber data: : Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Kediri

4. Terminal

Pemerintah Kota Kediri memiliki 1 (satu) buah terminal yaitu Terminal Bus dan MPU, dengan kondisi sebagai berikut :

- Lokasi : Desa Tamanan, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri
- Luas : 27.000 M²
- Didirikan : Tahun 1990
- Diresmikan : 06 Pebruari 1992
- Jenis terminal : Gabungan
- Type : B
- Kapasitas :
 - a. Tempat parkir bus jalur panjang = 24 bus
 - b. Tempat parkir bus jalur pendek / pemberangkatan = 12 bus
 - c. Jalur alternatif / bebas = 1 bus
- Fasilitas :
 - a. Pos kedatangan bus / penurunan penumpang
 - b. Information center
 - c. Pos pemberangkatan bus / pemungutan retribusi bus
 - d. Pos keamanan / SATPAM;

- e. Ruang tunggu penumpang;
- f. Pertokoan;
- g. Tempat parkir umum / tamu;
- h. Pelataran parkir mobil barang;
- i. Tower pengawasan;
- j. MCK umum;
- k. Kantor UPTD;
- l. Tempat penurunan penumpang MPU;
- m. Tempat tambal ban / pompa bensin;
- n. Pos pemungutan retribusi MPU;
- o. Telepon umum;
- p. Tempat / halaman parkir MPU;
- q. Depot;
- r. Agen transit Bus;
- s. Musholla.

2.4 Susunan Organisasi UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri

- Kepala UPTD Terminal Angkutan
- Sub unit keamanan
- Sub unit retribusi kendaraan
- Sub unit pos siaran
- Sub unit retribusi retribusi peron
- Sub unit tata usaha
- Sub unit retribusi bedak

2.5 Uraian Tugas

1. Kepala UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri
Tugas-tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang terminal
 - b. Penyelenggara terminal penumpang yang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.
 - c. Memelihara terminal penumpang untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan pokoknya.
 - d. Menertibkan terminal terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.
 - e. Mengelola penerimaan retribusi terminal sebagai bahan evaluasi dan laporan.
 - f. Menyiapkan karcis retribusi terminal untuk dibagikan kepada petugas pemungut retribusi terminal serta daftar tarif sebagai dasar pemungutan retribusi.
 - g. Menghimpun hasil pemungutan retribusi terminal dari petugas pemungut sesuai dengan bukti penyetoran untuk dicocokkan dengan bukti bon karcis.
 - h. Menghitung dan merekapitulasi penerimaan retribusi terminal sebagai bahan laporan dan penyetoran retribusi terminal.
 - i. Mencatat penerimaan dan penyetoran retribusi secara tertib kedalam buku pengelolaan retribusi terminal untuk tertib administrasi.
 - j. Membuat surat pengajuan permintaan karcis retribusi terminal sesuai dengan kebutuhan kepada dinas pendapatan daerah
 - k. Menyimpan bendel-bendel kercis retribusi terminal dan keuangannya langsung disetorkan ke dinas pendapatan daerah.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas perhubungan.

2. Bagian Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban

Tugas-tugas :

- a. Mengadakan pengaturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan terminal yang menyangkut keamanan dan ketertiban;
- b. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keluar masuknya kendaraan dan keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat tugas
- c. Melakukan perondaan di sekitar kawasan kerjanya dengan maksud mengadakan pengamatan, penelitian-penelitian, dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan akan menimbulkan ancaman dan gangguan.
- d. Mengadakan pengawalan uang / barang bila diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana, antara lain seperti :
 - Mengamankan tempat kejadian perkara.
 - Menangkap pelakunya.
 - Menolong korban.
 - Malaporkan meminta bantuan POLRI
 - Menyerahkan penyelesaian kepada POLRI terdekat.
- f. Memberikan tanda-tanda bahaya melalui alat-alat atau kode-kode tertentu bila terjadi kebakaran, bencana alam, atau kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak disekitar kerjanya, serta memberikan pertolongan dan bantuan seperlunya.
- g. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
- h. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
- i. Merawat saluran-saluran air;
- j. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
- k. Merawat alat komunikasi;

- l. Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran;
- m. Menertibkan para penjual asongan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal Angkutan.

3. Bagian Retribusi Kendaraan

Tugas-tugas :

- a. Bertanggung jawab dalam pemungutan retribusi sesuai dengan jenis pemungutannya, yaitu : Retribusi bus, MPU, angkot, dan parkir terminal;
- b. Menyetorkan hasil pungutan tepat waktu;
- c. Menertibkan penjualan karcis sesuai dengan bon karcis;
- d. Membuat laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi kendaraan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal Angkutan.

4. Bagian Pos Siaran

Tugas-tugas :

- a. Mengawasi sirkulasi arus kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum;
- b. Mengatur keberangkatan setiap kendaraan umum sesuai jadwal masing-masing trayek;
- c. Memperingatkan pengemudi yang tidak mentaati jadwal keberangkatan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap awak kendaraan dalam rangka peningkatan disiplin dan jadwal pemberangkatan;
- e. Mamantau tarif angkutan;
- f. Kalaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
- g. Kapasitas muatan yang diijinkan;
- h. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
- i. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya;

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal Angkutan.

5. Bagian Retribusi Peron

Tugas-tugas :

- a. Bertanggung jawab dalam pemungutan retribusi sesuai dengan jenis pemungutannya, yaitu retribusi peron;
- b. Menyetorkan hasil pungutan tepat waktu;
- c. Menertibkan penjualan karcis sesuai dengan bon karcis;
- d. Membuat laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi peron.

6. Bagian Tata Usaha

Tugas-tugas :

- a. Mengelola administrasi kepegawaian;
- b. Mengelola administrasi keuangan;
- c. Mengelola urusan rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan;
- d. Mengelola peralatan dan perbekalan;
- e. Mengadakan evaluasi PAD;
- f. Membukukan hasil setoran retribusi terminal setiap hari;
- g. Menyetorkan hasil retribusi terminal kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal Angkutan.

7. Bagian Retribusi Bedak

Tugas-tugas :

- a. Bertanggung jawab dalam pemungutan retribusi sesuai dengan jenis pemungutannya, yaitu retribusi bedak;
- b. Menyetorkan hasil pungutan tepat waktu;
- c. Menertibkan penjualan karcis sesuai dengan bon karcis;

- d. Membuat laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi bedak;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal Angkutan.

2.6 Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap organisasi. Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi yang mempunyai peranan penting, dimana peranan pegawai tersebut tergantung pada kedudukan dan fungsi pegawai tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui keadaan pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri. Adapun data keadaan pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Menurut Tingkat Pendidikan

Nomer	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sarjana (SI)	4	5,2
2	Sarjana Muda	4	5,2
3	SMU / Sederajat	45	58,4
4	SMP / Sederajat	14	18,3
5	SD	10	12,9
Jumlah		77	100

Sumber data: Daftar Keadaan Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2000

Tabel 8. Jumlah Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Berdasarkan Golongan dan Pangkat

Nomer	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Prosentase (%)
1	III a	2	2,6
2	II d	5	6,5
3	II c	6	7,8
4	II b	8	10,4
5	II a	8	10,4
6	I d	8	10,4
7	I b	2	2,6
8	Honorar	38	49,3
Jumlah		77	100

Sumber Data : Daftar Keadaan Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2000

Tabel 9. Jumlah Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Berdasarkan Bagian Pekerjaan

Nomer	Bagian	Jumlah
1	Kepala UPTD	1
2	Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban	24
3	Retribusi Kendaraan	25
4	Retribusi Bedak	6
5	Pos Siaran	6
6	Retribusi Peron	11
7	Tata Usaha	4
Jumlah		77

Sumber data: Daftar Keadaan Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2000

III PENYAJIAN VARIABEL PENELITIAN

3.1 Pengantar

Pada bab ini akan membahas data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data masing-masing variabel penelitian. Data yang telah terkumpul harus disusun secara teratur dan sistematis karena hal ini akan membantu peneliti dalam melakukan kegiatan analisis. Selanjutnya dalam penelitian ini akan diuraikan data yang berdasarkan skor dari masing-masing variabel yang diperoleh dari kuisisioner dengan menggunakan responden penelitian.

Sebelum penulis menganalisis dan menginterpretasikan data maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai variabel-variabel penelitian beserta data-data hasil penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu :

1. Variabel pengaruh (X) yaitu pengawasan pimpinan yang terdiri dari indikator-indikator :
 - a. Variabel pengawasan langsung
 - b. Variabel pengawasan tidak langsung
2. Variabel terpengaruh (Y) yaitu efektivitas pelaksanaan kerja pegawai yang terdiri dari indikator-indikator :
 - a. Kuantitas
 - b. Kualitas
 - c. Efektivitas waktu

3.2 Penyajian Data Variabel Pengaruh (X)

Variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah pengawasan pimpinan. Pengawasan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah

terlaksana sesuai dengan rencana. Untuk mengetahui adanya hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan maka pimpinan perlu mengadakan pengawasan. Seperti yang dikemukakan oleh Handayani (1988:141) bahwa pengawasan pimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.

Seperti yang telah penulis jelaskan diatas, dari variabel pengawasan pimpinan penulis mengambil indikator sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung
2. Pengawasan tidak langsung

3.2.1 Pengawasan Langsung

Dalam pengawasan langsung ini dimaksudkan adalah dalam pelaksanaan pekerjaan pimpinan mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap obyek yang diawasi. Dengan cara demikian pimpinan dapat melihat secara langsung bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan apabila terjadi kesulitan pimpinan dapat langsung memberikan petunjuk.

Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan langsung pimpinan dalam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kerja pegawai UPTD Terminal Angkutan Pada Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri dapat diketahui dari jawaban-jawaban responden terhadap item-item dari pengawasan langsung berikut ini :

1. mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan
2. Memeriksa hasil pekerjaan
3. Memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut jalannya pekerjaan

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator pengawasan langsung tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 10. Data Skor Jawaban Responden Tentang Pengawasan Langsung (X1)

Nomer responden	Item-item			Total skor
	1	2	3	
1.	2	3	3	8
2.	2	2	3	7
3.	3	2	2	7
4.	3	2	2	7
5.	3	3	2	8
6.	1	2	2	5
7.	2	2	2	6
8.	3	3	2	8
9.	3	2	2	7
10.	3	3	3	9
11.	3	3	3	9
12.	3	2	3	8
13.	3	3	3	9
14.	2	2	2	6
15.	3	1	2	6
16.	2	3	2	7
17.	2	2	3	7
18.	3	2	2	7
19.	2	2	1	5
20.	2	2	2	6
21.	2	2	2	6
22.	2	2	3	7

Sumber: Data primer diolah 2001

3.2.2 Pengawasan Tidak Langsung

Selain pengawasan langsung, juga diperlukan adanya pengawasan tidak langsung yaitu melalui laporan. Dalam pengawasan ini pimpinan hanya mengawasi dari jarak jauh. Pimpinan tidak mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan akan tetapi pimpinan hanya mempelajari dan menganalisis dokumen maupun laporan-laporan obyek yang diawasi.

Untuk mengetahui pengawasan tidak langsung dari pimpinan dalam mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kerja pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri dapat diketahui dari jawaban-jawaban responden terhadap item-item dari pengawasan tidak langsung:

1. Menganalisis laporan-laporan tentang hasil pekerjaan
2. Menilai kebenaran dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen tentang hasil pekerjaan.

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item dari indikator pengawasan tidak langsung tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 11. Data Skor Jawaban Responden Tentang Pengawasan Tidak Langsung (X2)

Nomer responden	Item-item		Total Skor
	1	2	
1	2	3	5
2	3	2	5
3	2	3	5
4	2	2	4
5	2	2	4
6	2	2	4
7	2	2	4
8	3	3	6
9	1	2	3
10	3	3	6
11	2	2	4
12	3	3	6
13	3	3	6
14	2	2	4
15	3	2	5
16	2	2	4
17	2	1	3
18	2	2	4
19	2	2	4
20	2	2	4
21	3	2	5
22	2	3	5

Sumber: Data primer diolah 2001

Berdasarkan jawaban-jawaban dari responden di atas, dapat penulis kelompokkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12. Data Skor Jawaban Responden Tentang Pengawasan Pimpinan

Nomer responden	Indikator		Total skor
	X1	X2	
1	8	5	13
2	7	5	12
3	7	5	12
4	7	4	11
5	8	4	12
6	5	4	9
7	6	4	10
8	8	6	14
9	7	3	10
10	9	6	15
11	9	4	13
12	8	6	14
13	9	6	15
14	6	4	10
15	6	5	11
16	7	4	11
17	7	3	10
18	7	4	11
19	5	4	9
20	6	4	10
21	6	5	11
22	7	5	12

Sumber: Data primer diolah 2001

3.3 Variabel Terpengaruh (Y)

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan kerja pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri dengan indikator sebagai berikut:

1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Efektivitas waktu

3.3.1 Kuantitas Kerja (Y1)

Kuantitas kerja menunjukkan jumlah atau volume kerja yang dapat diselesaikan oleh pegawai dalam periode tertentu. Adapun item kuantitas kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya tugas atau pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan beban yang telah ditentukan

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item dari indikator efektivitas pelaksanaan kerja diukur dari kuantitas kerja dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 13. Data Skor Jawaban Responden Tentang Kuantitas Kerja (Y1)

Nomer responden	Item	Total skor
	1	
1.	3	3
2.	2	2
3.	2	2
4.	3	3
5.	3	3
6.	2	2
7.	2	2
8.	3	3
9.	3	3
10.	3	3
11.	2	2
12.	3	3
13.	3	3
14.	2	2
15.	2	2
16.	3	3
17.	2	2
18.	2	2
19.	2	2
20.	2	2
21.	2	2
22.	1	1

Sumber: Data primer diolah 2001

3.3.2 Kualitas kerja (Y2)

Kualitas kerja ini menunjukkan mutu dan kesempurnaan pelaksanaan kerja. Mutu dan kesempurnaan kerja ini berhubungan dengan ketepatan, kelengkapan dan kerapian dalam penyelesaian pekerjaan. Adapun item-item dari kualitas kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan pegawai atas ketepatan kerjanya.
2. Aktivitas pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan pegawai atas kelengkapan kerjanya.
3. Aktivitas pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan pegawai atas kerapian kerjanya.

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 14. Data Skor Jawaban Responden Tentang Kualitas Kerja (Y2)

Nomer responden	Item-item			Total skor
	1	2	3	
1.	3	3	3	9
2.	3	3	3	9
3.	2	2	2	6
4.	3	2	2	7
5.	2	3	2	7
6.	2	2	2	6
7.	2	2	2	6
8.	3	3	3	9
9.	2	2	2	6
10.	3	3	3	9
11.	2	2	3	7
12.	2	2	2	6
13.	3	3	3	9
14.	2	2	1	5
15.	3	2	3	8
16.	2	2	3	7
17.	2	1	3	6
18.	3	3	2	8
19.	2	2	2	6
20.	2	2	2	6
21.	2	3	2	7
22.	1	2	3	6

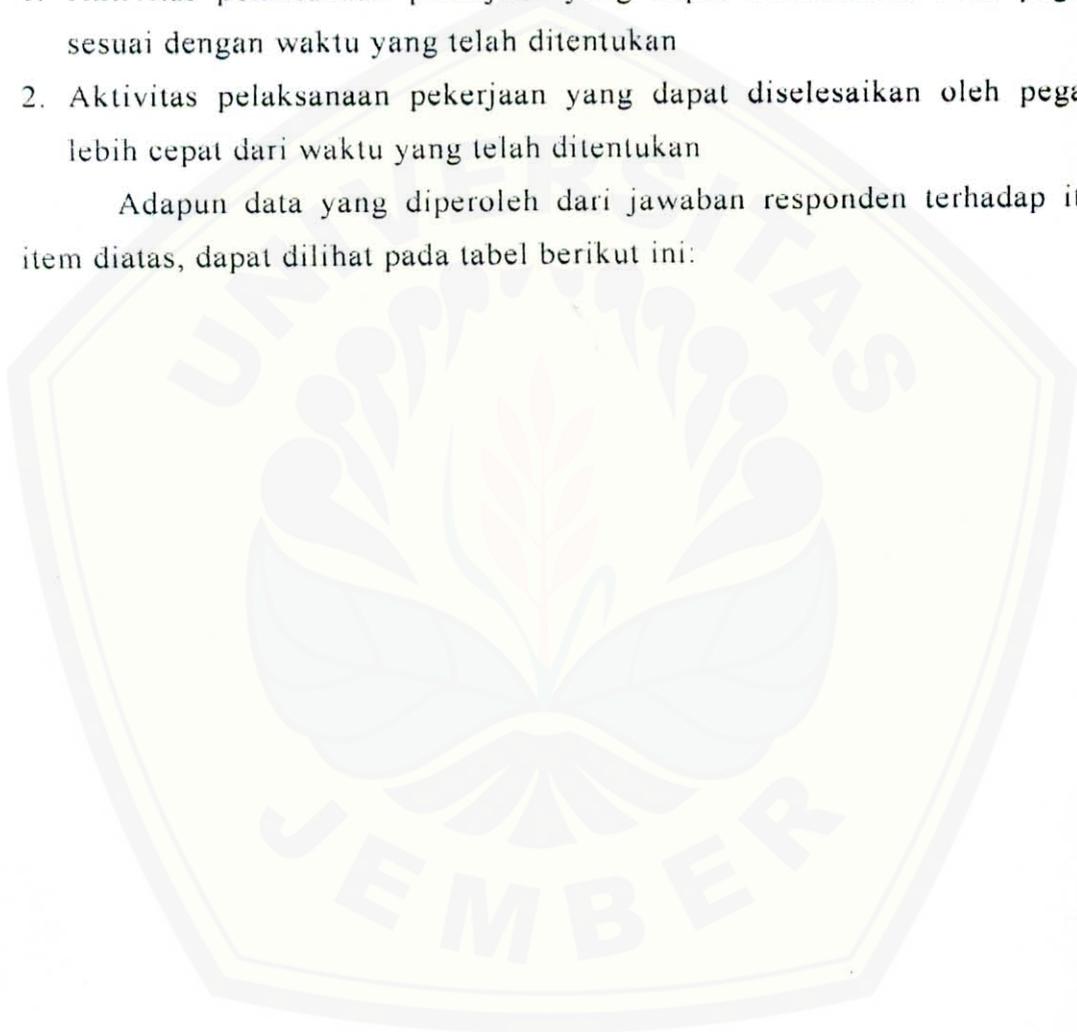
Sumber: Data primer diolah 2001

3.3.3 Efektivitas waktu (Y3)

Efektivitas waktu adalah apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan pada waktunya atau bahkan mungkin juga pekerjaan itu dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Adapun item-item dari efektivitas waktu ini adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas pelaksanaan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2. Aktivitas pelaksanaan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan

Adapun data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 15. Data Skor Jawaban Responden Tentang Efektivitas Waktu (Y3)

Nomer responden	Item-item		Total skor
	1	2	
1.	3	3	6
2.	3	3	6
3.	3	2	5
4.	2	3	5
5.	3	3	6
6.	2	2	4
7.	2	2	4
8.	2	2	4
9.	2	2	4
10.	3	3	6
11.	3	3	6
12.	3	3	6
13.	3	2	5
14.	2	2	4
15.	2	2	4
16.	1	3	4
17.	2	3	5
18.	2	2	4
19.	2	2	4
20.	2	1	3
21.	2	2	4
22.	3	3	6

Sumber: Data primer diolah 2001

Berdasarkan jawaban-jawaban responden di atas dapat penulis kelompokkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 16. Data Skor Jawaban Responden Tentang Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai

Nomer responden	Indikator			Total skor
	Y1	Y2	Y3	
1.	3	9	6	18
2.	2	9	6	17
3.	2	6	5	13
4.	3	7	5	15
5.	3	7	6	16
6.	2	6	4	12
7.	2	6	4	12
8.	3	9	4	16
9.	3	6	4	13
10.	3	9	6	18
11.	2	7	6	15
12.	3	6	6	15
13.	3	9	5	17
14.	2	5	4	11
15.	2	8	4	14
16.	3	7	4	14
17.	2	6	5	13
18.	2	8	4	14
19.	2	6	4	12
20.	2	6	3	11
21.	2	7	4	13
22.	1	6	6	13

Sumber: Data primer diolah 2001.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis kemukakan sebeumnya serta berdasarkan pada hasil analisis dan interpretasi data maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil perhitungan korelasi r_s antara variabel X dengan variabel Y diperoleh nilai 0,845, sedangkan harga kritis untuk taraf kepercayaan sebesar 95 % pada $N = 22$ adalah sebesar 0,359. Berarti perhitungan r_s lebih besar dibandingkan dengan harga kritisnya ($0,845 > 0,359$). Dengan demikian ada hubungan antara variabel pengawasan pimpinan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kerja pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.
2. Dari perhitungan Ttest antara variabel X dengan variabel Y diperoleh angka sebesar 7,066, sedangkan harga kritis dari distribusi T pada level signifikansi 0,05 pada $df = 20$ ($N-2$) adalah 2,086. Sehingga hasil tersebut lebih besar dari harga kritisnya ($7,066 > 2,086$) maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel pengawasan pimpinan (X) dengan variabel efektivitas pelaksanaan kerja pegawai (Y).

5.2 Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang ada dengan mendasarkan pada kesimpulan yang dibuat, maka ada beberapa saran yang penulis berikan.

1. Diharapkan pengawasan pimpinan dalam hal ini adalah Kepala UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung dapat ditingkatkan karena dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja pegawai UPTD Terminal Angkutan di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.

-
2. Pegawai hendaknya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja serta pimpinan meningkatkan pengawasan agar terjalin kerja sama yang baik antara keduanya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A Loedin, 1990. *Pengantar Pengetahuan Dasar Penelitian dan Statistik*.
Surabaya: Airlangga University press
- Anonim, 1999. *Garis-Garis Besar Haluan Negara*
- Arikunto, S. 1993. *Metode Research*. Jakarta.: Gramedia
- Emerson, H. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
Yogyakarta : BPA UGM
- Gie, T.L. 1990. *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*. Jakarta : Karya
Pustaka
- Hadi, S. 1989. *Metode Research*. Yogyakarta : Yayasan Pemulihan Fakultas
Psikologi UGM
- Handyaningrat, S. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan
Manajemen*. Jakarta.: Gunung Agung
- _____, 1989. *Administrasi Pembangunan Dalam Pembangunan
Nasional*. Jakarta: Haji Masagung
- Hasibuan Malayu SP, 1989. *Manajemen Dsar Pengertian dan Masalah*.
Jakarta : Haji Masagung
- Hatta, M. 1970. *Pengantar Kejalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta : PT.
Pembangunan
- Koentjaraningrat, 1981. *Metodologi Penelitian Masyarakat* Jakarta:Gramedia
- Manullang. 1985. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mussanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta : Gunung
Agung
- Sarwoto. 1983. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia
Indonesia
- Siagian, SP. 1986. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agun
- _____, 1992. *Fungsi-Fungsi Managerial*. Jakarta : Bumi Aksara

- Siegel, S. 1997. *Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Gramedia
- Singarimbun, M dan S, Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Sujamto. 1983. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____, 1985. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Surachmad, W. 1985. *Dasar-Dasar dan Teknik Research*. Bandung : CV Tarsito
- Thoha, Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Press
- Tjokrowinoto. 1980 . *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- _____, 1987. *Tahap – Tahap Penelitian Sosial*. Yogyakarta : IPM
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999. *Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*.
- Westra, P. 1987. *Pokok-Pokok Pengertian Umum Manajemen*. Yogyakarta : Akademi Administrasi Negara
- Wilson dan Heyel. 1972. *Hand Book of Modern Office Management and Administration*. MC Grawhill Inc.

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

I. Identitas Peneliti

Nama : I Gede Agus Sudarto
NIM : E1C1 95-177
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Jl KH. Wahid Hasyim Gg I A No.65 Kediri

II. Pengantar

Dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1), penulis diharuskan menyelesaikan skripsi. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah :

“ Hubungan Antara Pengawasan Pimpinan (Kepala UPTD Terminal Angkutan) Dengan Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintahan Kota Kediri”

Untuk itulah, guna melengkapi data yang dibutuhkan, kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membantu pencapaian tujuan penelitian ini dengan mengisi daftar pertanyaan atau kuisisioner sesuai dengan keadaan sebenarnya yang telah penulis sediakan. Perlu Bapak / Ibu Saudara ketahui, dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kedinasan dari Bapak / Ibu / Saudara sekalian, melainkan hanya untuk kepentingan akademis belaka.

Atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara meluangkan waktu untuk mengisi daftar quisioner ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Serta sebelumnya kami mohon maaf apabila ditemukan kata-kata yang kurang berkenan.

Hormat kami,

I Gede Agus Sudarto

III. Petunjuk Pengisian

Dalam angket yang penulis buat ini, terdiri dari dua bagian yaitu:

- Bagian A : Identitas responden
(Bapak / Ibu / Saudara cukup mengisi pada tempat yang telah kami sediakan)
- Bagian B : Daftar pertanyaan
(Mohon Bapak / Ibu / Saudara memberi tanda silang (X) pada jawaban yang paling dianggap paling sesuai)

A. Identitas responden

1. Nomer responden :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Jabatan :
5. Masa kerja :

B. Daftar pertanyaan

I. Variabel pengawasan pimpinan

a. Pengawasan langsung

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan ?
a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara memeriksa hasil pekerjaan ?
a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah
3. Apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara memberi petunjuk dalam pelaksanaan pekerjaan ?
a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah

b. Pengawasan tidak langsung

1. Apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara menganalisis hasil pekerjaan ?
a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah
2. Selain menganalisis apakah pimpinan Bapak/Ibu/Saudara juga menilai kebenaran antara laporan dengan kenyataan hasil pekerjaan ?
a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah

II. Variabel Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai

a. Kuantitas kerja

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan beban yang telah ditentukan ?
a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah

b. Kualitas kerja

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketepatan kerja yang dipersyaratkan ?
a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kelengkapan kerja yang dipersyaratkan ?

a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kerapian kerja yang dipersyaratkan ?

a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah

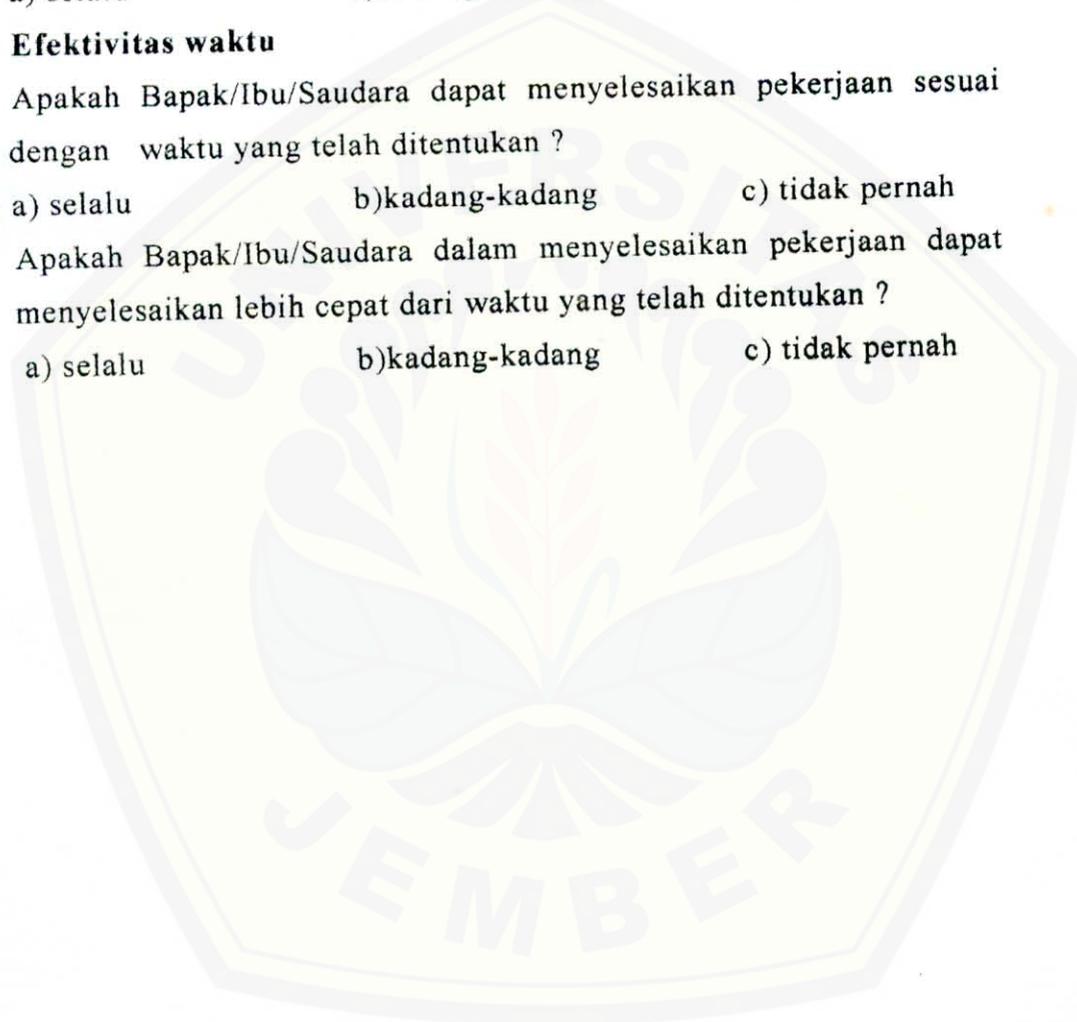
c. Efektivitas waktu

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ?

a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara dalam menyelesaikan pekerjaan dapat menyelesaikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan ?

a) selalu b) kadang-kadang c) tidak pernah



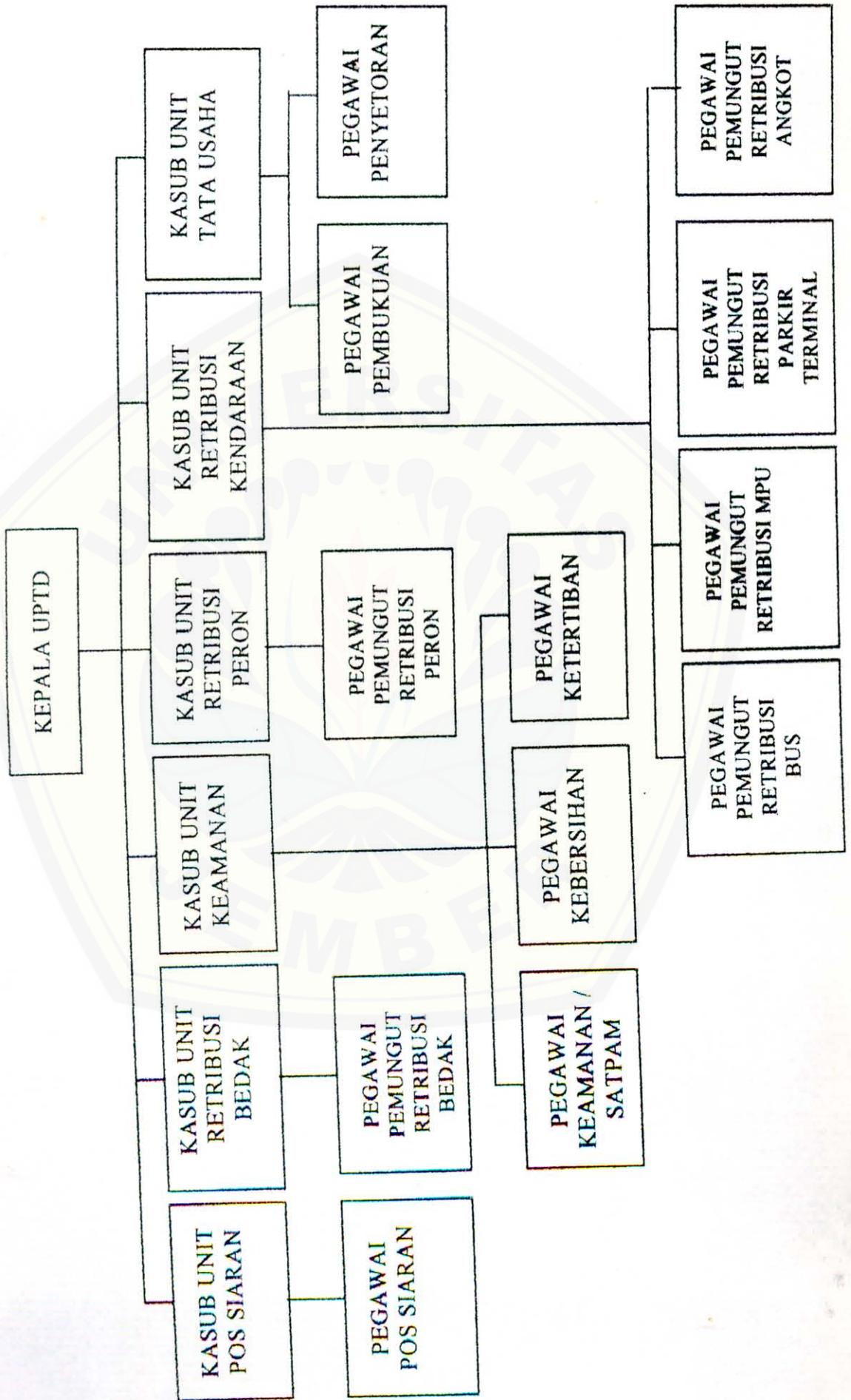
Lampiran 1 Tabel 1.
 PROGRAM KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL ANGKUTAN DI TERMINAL
 TAMANAN PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI
 TAHUN ANGGARAN 2000

NO	PASAL DAN DIGIT	URAIAN PASAL DAN DIGIT	URAIAN JENIS KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	1 SUB UNIT TU 2.4.1.1001-1005	Belanja Pegawai	-Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, upah tenaga honorer daerah	Tri wulan I s/d III	
2	2.4.1.1011-1012	Belanja Barang	-Melaksanakan belanja barang sesuai dana yang tersedia, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian alat tulis kantor • Barang cetakan • Jasa perkantoran • Biaya langganan listrik, air dan telepon • Pembelian alat-alat listrik dan inventaris kantor 	Tri wulan I s/d III	
3	2.4.1.1051-1054	Belanja Pemeliharaan	-Melaksanakan pemeliharaan / perbaikan gedung kantor	Tri wulan I s/d III	
4	2.4.1.1071	Belanja Perjalanan Dinas	-Melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang tugas ke luar kota, termasuk biaya operasional	Tri wulan I s/d IV	

5	2.4.1.1081-1095	Belanja Lain-lain	-Melaksanakan belanja lain-lain meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Insentif PAD • Honor satpam • Pembelian seragam satpam 	Tri wulan I s/d IV	Untuk meningkatkan PAD
	II SUB UNIT RETRIBUSI KENDARAAN 2.4.2.2001-2004 2.4.2.2005-2011	Proyek pembangunan dua pos pengendali	-Proyek pembuatan dua pos pengendali angkutan di pasar muning dan selomangleng. -Mengalihkan route bus umum dari Surabaya - Tulungagung masuk Terminal Tamanan untuk meningkatkan pelayanan dan PAD, melewati jalan M.Bismo, Jembatan Mojoroto, Terminal Tamanan	Tri wulan II s/d IV Tri wulan I s/d III	Untuk meningkatkan PAD Untuk pelayanan masyarakat
	2.4.2.2012-2014		-Melakukan pengawasan / pemantauan kendaraan meliputi retribusi bus, MPU, Angkot dan Parkir di Terminal	Tri wulan I s/d III	Untuk meningkatkan PAD
	III SUB UNIT KEAMANAN, KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN 2.4.3.3001-3005 2.4.3.3006-3008	Proyek Pemeliharaan	-Pemeliharaan lampu-lampu penerangan di lokasi terminal / kantor. -Mengadakan pengecatan kembali bangunan/gedung-gedung di terminal -Pemeliharaan kebersihan dan keindahan serta keamanan di lingkungan terminal	Tri wulan I s/d III	Untuk pelayanan kepada masyarakat Untuk pelayanan kepada masyarakat
	2.4.3.3009-3011			Tri wulan I s/d III	Untuk pelayanan kepada masyarakat

2.4.3.3012-3014			-Mengadakan pedagang kaki lima yang berjualan di jalur pemberangkatan bus di terminal	Tri wulan I s/d III	Untuk pelayanan kepada masyarakat
IV SUB UNIT RETRIBUSI PERON 2.4.4.4001-4003 2.4.4.4004-4006	Proyek renovasi		-Mengadakan renovasi tempat pemungutan retribusi peron	Tri wulan II	Untuk pelayanan kepada masyarakat
2.4.4.4007-4009			-Melakukan pengawasan / pemantauan pendapatan retribusi peron	Tri wulan I s/d III	Untuk meningkatkan PAD
V SUB UNIT POS SIARAN 2.4.5.5001-5004			-Menambah fasilitas selasar dari pemberhentian ke ruang tunggu untuk kenyamanan pelayanan penumpang umum.	Tri wulan II s/d IV	Untuk pelayanan masyarakat
2.4.5.5005-5007			-Pembinaan dan bimbingan terhadap awak kendaraan angkutan penumpang umum di kota Kediri sesuai Kep. Men. Hub. No. K.M. 68/1993	Tri wulan I s/d III	Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat
VI SUB UNIT RETRIBUSI BEDAK 2.4.6.6001.6003 2.4.6.6004-6007			-Menghimbau untuk memakai pakaian seragam dan tanda jati diri bagi pengemudi / kru angkutan kota dan angkutan antar kota sesuai Kep. Men. Hub. No. K.M. 60/1993	Tri wulan I s/d III	Untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat
			-Mengadakan pengawasan pemakaian listrik dan air pada kios atau bedak di lokasi terminal.	Tri wulan I s/d III	Untuk meningkatkan PAD
			-Melakukan pengawasan / pemantauan pendapatan retribusi bedak	Tri wulan I s/d III	Untuk meningkatkan PAD

STRUKTUR ORGANISASI UPTD TERMINAL TAMANAN KOTA KEDIRI



Tabel P₃ Tabel Harga-harga Kritis r_s Koefisien Korelasi Ranking Spearman^{*)}

N	Tingkat Signifikansi (tes satu-sisi)	
	.05	.01
4	1.000	.000
5	.900	1.000
6	.829	.943
7	.714	.893
8	.643	.833
9	.600	.783
10	.564	.746
12	.506	.712
14	.456	.645
16	.425	.601
18	.399	.564
20	.377	.534
22	.359	.508
24	.343	.485
26	.329	.465
28	.317	.448
30	.306	.432

^{*)} Disadur dari Olds, E.G 1938. *Distributions of Sums of squares of rank differences for small numbers of individuals*. Ann. Math. Statist, 9, 133 - 148, dan dari Olds, E.G, 1949 *The 5% significance levels for sum of squares of rank differences and a correction*. Ann. Math. Statist, 20, 117 - 118, dengan izin penulis dan penerbit.

TABEL IV
TABEL NILAI-NILAI

d.b.	Taraf Signifikansi							
	50%	40%	20%	10%	5%	2%	1%	0,1%
1	0,000	1,376	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	636,691
2	0,816	1,061	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,598
3	0,765	0,978	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,941
4	0,741	0,941	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	0,727	0,920	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,859
6	0,718	0,906	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	0,711	0,896	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,405
8	0,706	0,889	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	0,703	0,883	1,385	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	0,700	0,879	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	0,697	0,876	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	0,695	0,873	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	0,694	0,870	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	0,692	0,868	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	0,691	0,866	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	0,690	0,865	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	0,689	0,863	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	0,688	0,862	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
19	0,688	0,861	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	0,687	0,860	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850
21	0,686	0,859	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
22	0,686	0,858	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792
23	0,685	0,858	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,767
24	0,685	0,857	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745
25	0,684	0,856	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725
26	0,684	0,856	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707
27	0,684	0,855	1,314	1,705	2,052	2,473	2,771	3,690
28	0,683	0,855	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674
29	0,683	0,854	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,659
30	0,683	0,854	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646
40	0,681	0,851	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551
60	0,679	0,848	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460
120	0,677	0,845	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
∞	0,674	0,842	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,291



Nomor : 1166 /J25.3.1/PL.5/2001

26 September 2001

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan ijin melaksanakan penelitian**

Kepada : **Yth. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Pemerintah Kabupaten Kediri
di -**

KEDIRI.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 3401/J25.1.2/PL.5'2001 Tanggal 24 September 2001, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama/NIM : I GEDE AGUS SUDARTO / E1C195177
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/Administrasi Negara
Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim Gg 1A No. 65 Kediri.
Judul Penelitian : Hubungan Antara Pengawasan Pimpinan (Kepala UPTD Terminal Angkutan) Dengan Efektivitas Pelaksanaan Kerja Pegawai UPTD Terminal Angkutan Di Terminal Tamanan Pemerintah Kota Kediri.
Lokasi : Kab. Kediri.
Lama Penelitian : 1 (satu) bulan.

maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
Sekretaris,

DR. Ir. sc. agr. Didik Sulistyanto.
NIP. 131 792 232

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip

SURAT - KETERANGAN
Untuk melakukan survey/Research
Nomor : 072/3887/420.33/2001

Membaca : Surat dari Ketua Universitas Jember Nomor : 1166/J.25.3
PL.5/2001, tgl.26 September 2001.

Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor : Gub/187/1972 tertanggal 17 Juli 1972.

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan survey
research oleh :

1. Nama Organisasi/Pen. Jawab : I GEDE AGUS SUDARTO
MHS.FAK.SOSPOL UNIV.JEMBER.
2. Alamat : Jl.Kalimantan No.37 Jember .
3. Thema/Acara Survey/Research : " HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN PIMPINAN
(KEPALA UPTD TERMINAL ANGKUTAN) DAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA PEKAWAN
UPTD TERMINAL ANGKUTAN DI TERMINAL
TAMANAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI "
4. Tempat Obyek Survey/research: KOTA KEDIRI
5. Lamanya Survey / research : 1 (satu) bln terhitung tgl.surat dik
luarkan.
6. Pengikut/ peserta : ----

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setibanya ditempat yang dituju diwajibkan melapor
kedatangannya kepada Camat dan kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum Pemerintah Daerah.
3. Menjaga tata tertib keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan
pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/lukisan yang dapat melukai/menyi
gung/menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan - ketentuan y
telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah dilakukan survey/research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kep
pejabat pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey/research se
lum meninggalkan daerah tempat survey/research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya survey/research diwajib
memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
 - a. Kepala Kantor Sosial Politik Kota Kediri.
 - b. Camat Kepala Wilayah yang bersangkutan.
 - c. Kepala Dinas/Jawatan yang berngkutan.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku apabila ternyata b
pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
tersebut diatas.

Kediri, 28 September 2001.

Tembusan :

Yth. 1. REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Drs. H. MUHAIMIN MSi

Pembina Tk.I





PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN DAERAH

Jalan Semeru Nomor 55 Telepon (0354) 773795, 775255

KEDIRI

SURAT KETERANGAN SURVAY / RESEARCH

Nomor : 072/ 637 /420.46/2001

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kesbang dan Linmas Kota Kediri, Nomor : 072/385/420.33/2001, tanggal 28 September 2001 tentang Ijin Survay/ Research, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : I GEDE AGUS SUDARTO
Pekerjaan : Mahasiswa FISIP – Administrasi Negara
Universitas Jember
Alamat : Jl. K.H Wakhid Hasyim Gg. 1 A No. 65 Kediri

Telah melaksanakan survay/research di Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan kami selama 1 (satu) bulan dengan tema "HUBUNGAN ANTARA PENGAWASAN PIMPINAN (KEPALA UPTD. TERMINAL ANGKUTAN) DENGAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KERJA PEGAWAI UPTD. TERMINAL ANGKUTAN DI TERMINAL TAMANAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 29 Oktober 2001

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA KEDIRI


Ir. BAMBANG BASUKI HANUGRAH, MM.

Pembina

NIP. 510 090 052

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Kesbang dan Linmas
Kota Kediri
2. Sdr. Dekan FISIP Universitas Jember
3. Mahasiswa yang bersangkutan